



Teguh Heru Widiyanto

**MANAJEMEN SUPERVISI  
KOMITE MADRASAH  
DAN MUTU PENDIDIKAN**

*Studi di MI Muhammadiyah  
Getas Banjarnegara*

# **MANAJEMEN SUPERVISI KOMITE MADRASAH DAN MUTU PENDIDIKAN**

Studi di MI Muhammadiyah Getas Banjarnegara

---

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **MANAJEMEN SUPERVISI KOMITE MADRASAH DAN MUTU PENDIDIKAN**

Studi di MI Muhammadiyah Getas Banjarnegara

**Teguh Heru Widiyanto**



## **MANAJEMEN SUPERVISI KOMITE MADRASAH DAN MUTU PENDIDIKAN**

Studi di MI Muhammadiyah Getas Banjarnegara

Penulis : Teguh Heru Widiyanto  
Editor : Sulis Rokhmawanto dan Imam Subarkah  
Tata letak : @mh.afnan\_  
Desain cover : Dani RGB

Cetakan I, Maret 2022

Diterbitkan oleh:

### **Magnum Pustaka Utama**

Jl. Parangtritis KM 4, RT 03, No 83 D

Salakan, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta

Telp. 0878-3981-4456, 0821-3540-1919

Email: [penerbit.magnum@gmail.com](mailto:penerbit.magnum@gmail.com)

Homepage: [www.penerbitmagnum.com](http://www.penerbitmagnum.com)

*bekerjasama dengan*

### **IAINU Kebumen Press**

Jln. Tentara Pelajar No. 55-B, Kebumen 54312

ISBN: 978-623-6911-57-0



## Pengantar Penulis

Buku ini merupakan hasil riset lapangan tentang manajemen pendidikan, khususnya terkait manajemen supervise dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Buku ini menarik sebab supervisi yang menjadi focus kajiannya dilakukan Komite Madrasah. Penulis menyusun buku ini dengan melakukan riset di MI Muhammadiyah Getas Pandanarum Banjarnegara.

Melalui buku ini penulis mencoba menyuguhkan konsep dan pengertian tentang supervisi, tentang komite madrasah, pola dan model manajemen supervisinya dari perencanaan sampai evaluasinya. Kesemuanya dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu Pendidikan. Melalui buku ini penulis mencoba memotret utuh model manajemen supervisi komite madrasah di lokasi riset.

Buku ini tentunya tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bimbingan orang lain. Oleh karenanya pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Pascasarjana IAINU Kebumen, khususnya kepada Fikria Najitama MSI, Dr Imam Satibi MPdI, Dr Sulis Rokhmawanto MSI, dan Dr Muhyidin MPd. Perkenankan penulis mengucapkan terimakasih juga kepada keluarga, khususnya orangtua penulis, istri dan anak-anak tercinta. Juga kepada keluarga besar MI Muhammadiyah Getas Pandanarum Banjarnegara.

Akhirnya, buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, dan karenanya kritik dan saran konstruktif tetap penulis nantikan untuk perbaikan dan kemajuan kedepan. Selamat membaca dan semoga buku ini bermanfaat.

Kebumen, Maret 2022

Teguh Heru Widiyanto



## Daftar Isi

<b>Pengantar Penulis</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>BAB I SUPERVISI DAN MUTU PENDIDIKAN</b> .....	1
A. Menelisik Supervisi .....	1
B. Persoalan Supervisi dan Mutu Pendidikan .....	5
<b>BAB II MANAJEMEN SUPERVISI PENDIDIKAN</b> .....	7
A. Manajemen Supervisi .....	7
B. Komite Madrasah .....	32
C. Mutu Pendidikan.....	41
<b>BAB III IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUPERVISI DI</b> <b>MI MUHAMMADIYAH GETAS BANJARNEGARA</b> .....	7
A. MI Muhammadiyah Getas Banjarnegara.....	49
B. Perencanaan Supervisi Komite Madrasah .....	60
C. Pelaksanaan Supervisi Komite Madrasah .....	62
D. Evaluasi Supervisi Komite Madrasah .....	65



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	69
Daftar Pustaka.....	73
Tentang Penulis.....	77



## BAB I

# SUPERVISI DAN MUTU PENDIDIKAN

### A. Menelisik Supervisi

Pelaksanaan supervisi sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Adanya pelaksanaan supervisi yang dilakukan maka guru memiliki peluang untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Pelaksanaan supervisi mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kepada guru, khususnya dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Oleh karena itu, kehadiran seorang pengawas sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan kompetensi guru.

Sutisna dalam Syaiful Sagala mengemukakan bahwa supervisi sebagai segala usaha yang diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi para guru dan tenaga kependidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melibatkan stimulus pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan revisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar, dan evaluasi pengajaran.<sup>1</sup>

Guru sebagai penjamin mutu pendidikan diruang kelas, sementara pengawas adalah penjamin mutu pendidikan dalam area yang lebih luas pada tingkat madrasah. Guru adalah ujung tombak pendidikan di madrasah. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas guru sudah

---

<sup>1</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 229.

seharusnya menjadi bagian rencana strategis dan masuk dalam kelompok prioritas utama. Jika kualitas diri guru meningkat, otomatis kualitas pendidikan meningkat, begitu juga dengan outputnya.<sup>2</sup>

Mengingat begitu pentingnya peranan guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, selayaknyalah bila kemampuan guru ditingkatkan melalui program pembinaan secara terus menerus agar guru memiliki kemampuan sesuai tuntutan profesional. Salah satu cara untuk melakukan pembinaan profesionalitas kinerja guru dalam bidang akademik perlu dilakukan kegiatan supervisi di madrasah/madrasah salah satunya oleh komite madrasah. Pandangan penulis tersebut diperkuat dengan pendapat Ali Imron bahwa guru perlu di supervisi terus kemampuan profesionalnya. Sebab, dengan supervisi yang terus menerus, mereka akan memutakhirkan kemampuan profesionalnya. Secara konseptual hal tersebut dibenarkan dan terbukti secara empirik.<sup>3</sup>

Berdasarkan kenyataan diatas, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Salah satunya yaitu, madrasah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak (keluarga, masyarakat) untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Dalam pelaksanaannya, peran serta dan dukungan masyarakat baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Madrasah.

Keberadaan komite madrasah ini telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite madrasah di tingkat satuan pendidikan. Menurut keputusan Mendiknas, komite madrasah merupakan sebuah

---

<sup>2</sup> Moh. Saroni, *Personal Branding Guru*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 9.

<sup>3</sup> Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 6.

badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di aturan pendidikan baik pada pendidikan pramadrasah, jalur pendidikan madrasah, maupun jalur pendidikan luar madrasah. Dalam penamaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Madrasah, majlis madrasah, majelis madrasah, komite TK, atau nama-nama lain yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu madrasah. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada *action* di lapangan. Namun dalam realitasnya selama ini partisipasi masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana dan masih jauh dari apa yang diharapkan.<sup>5</sup>

Dari berbagai pengalaman dan kenyataan-kenyataan dilapangan, ternyata dalam pelaksanaan konsep komite tidak mudah. Kesulitannya bukan pada tataran konsep komite yang tidak jelas, tetapi keberadaan komite madrasah belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama dimana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tidak menghiraukan keinginan dari masyarakat sekitarnya. Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki. Masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab, padahal merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul bersama-sama.

---

<sup>4</sup> Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 89

<sup>5</sup> Nana Syaodih Sukmadinata dkk., *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrument)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Mendiknas tentang Komite Madrasah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, organisasi semacam itu, yang benar-benar berhasil mampu melakukan peran dan fungsinya secara baik, jumlahnya amat kecil.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai mitra penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya manajemen komite madrasah agar dalam kemitraan bisa menempatkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Komite madrasah diharapkan tidak sekedar hanya papan nama, pelengkap organisasi, atau hanya sebagai alat pengumpul dana dari masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah berfungsi dalam pelaksanaan supervisi di madrasah/ madrasah melalui manajemen supervisi yang tepat sehingga terwujud mutu pendidikan yang baik. Inilah yang terjadi di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.

MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat dasar yang memiliki kelebihan yaitu adanya komite madrasah yang berperan aktif dalam pendidikan, salah satunya adalah melaksanakan supervisi. Supervisi tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan agar lebih meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.

Jarang terdengar adanya supervisi dari komite madrasah, karena pada umumnya supervisi dilakukan oleh kepala madrasah atau oleh pengawas pendidikan. Namun di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara komite memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan supervisi di madrasah tersebut, sehingga terjalin hubungan dan komunikasi yang sangat baik antara madrasah dan masyarakat.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “manajemen supervisi komite

---

<sup>6</sup> Sri Renani Pantjastuti. dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), h.

madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.”

## **B. Persoalan Supervisi dan Mutu Pendidikan**

Berdasarkan judul, belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan supervisi komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pelaksanaan supervisi komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimana evaluasi supervisi komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara?





## BAB II

# MANAJEMEN SUPERVISI PENDIDIKAN

### A. Manajemen Supervisi

#### 1. Pengertian Manajemen Supervisi

Kata manajemen berasal dari kata *manage (to manage)* yang berarti “*to conduct or to carry on, to direct*”. Dalam Kamus Inggris Indonesia kata *manage* diartikan mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Menurut George R Terry dalam Barlian menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber yang lain.<sup>7</sup>

Adapun menurut Stoner dalam Handoko manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Sedangkan manajemen menurut Suharsimi dan Yuliana adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan

---

<sup>7</sup> Ujang Cepi Barlian, *Manajemen Strategik; Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Khifa Insan Cendikia, 2016), h. 11

<sup>8</sup> Tani N. Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 8



usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Menurut Terry yang menyebutkan bahwa: *Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals.*<sup>10</sup> (manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi)

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan manajemen adalah pengelolaan organisasi yang terukur dan terencana dengan target khusus, diawali dengan sebuah persiapan yang matang, diteruskan dengan proses yang baik dan pengawasan yang berkesinambungan sehingga hasil evaluasinya menghasilkan nilai baik dan dari hasil evaluasi tersebut bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang bisa dijadikan acuan untuk menjadikannya lebih baik.

Sementara itu pengertian supervisi secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris *supervision* artinya pengawas di bidang pendidikan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Ditinjau dari sisi morfologinya, supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk kata. Kata supervisi terdiri dari dua kata, yakni super berarti atas, lebih, visi berarti lihat, tilik, awasi.<sup>11</sup>

Supervisi secara klasik yaitu suatu pekerjaan menginspeksi, memeriksa dan mengawasi melalui cara memata-matai untuk perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Setelah berkembang paham istilah, supervisi mempunyai ciri-ciri diantaranya sistematis, objektif, berkelanjutan dan menggunakan instrumen yang dapat memberikan

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto dan Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Al Ma'arif, 2013), h. 3

<sup>10</sup> George R. Terry, *Principle of Management*, 6th Edition, (Georgetown: Richard D, Irwing Inc, 2009), h. 58

<sup>11</sup> Jasmani Asf, Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 15

informasi sebagai umpan balik untuk dapat melakukan langkah tindak lanjut menuju perbaikan masa akan datang.

Menurut Willes yang dikutip oleh Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa yang mengemukakan secara singkat bahwa supervisi sebagai bantuan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik.<sup>12</sup> Supervisi sebagai pelayanan khususnya menyangkut perbaikan proses belajar mengajar. Sementara itu, Depdiknas merumuskan supervisi sebagai pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf madrasah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.

Supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.<sup>13</sup> Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, kepala madrasah adalah administrator sekaligus supervisor. Karena itu tugasnya adalah membina dan mengembangkan staf agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Supervisi pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengkoordinasikan dan membimbing secara kontinu yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan aspek pengajaran untuk kemajuan pendidikan yang lebih baik.

Situasi belajar inilah yang seharusnya diperbaiki dan ditingkatkan melalui layanan kegiatan supervisi. Dengan demikian layanan supervisi tersebut mencakup seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Menurut Wiles yang dikemukakan oleh Luk-luk Nur Mufidah bahwa konsep supervisi modern yang dirumuskan sebagai berikut. “*Supervision is assistance in the development of better teaching learning situation*”. Supervisi adalah bantuan pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jasmani Asf, Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan Terobosan ...*, h. 26

<sup>13</sup> Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.. 125

<sup>14</sup> Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 4

Pendapat lain dari Pupuh Fathurrohman Supervisi adalah aktifitas yang menentukan kondisi atau syarat-syarat yang esensial yang akan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.<sup>15</sup>36 Jadi dapat diartikan supervisi adalah pengarah serta pengendali kepada tingkat anak buah yang ada dibawahnya dalam suatu organisasi atau kelompok. Orang yang menjalankan supervise disebut dengan supervisor.<sup>16</sup> supervisor mempunyai tanggung jawab untuk membina, memantau, dan memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Rumusan ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar (goal, material, technique, method, teacher, student, and environment).<sup>17</sup> Menurut M. Ngalim Purwanto menyatakan, Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai madrasah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Peter F. Oliva menyatakan bahwa: “*Supervision in conceived as a service to teacher, both individual an in group supervision is means offering to teachers specialized help in improving instruction*”.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa supervisi merupakan layanan kepada guru, baik secara individual maupun kelompok. Supervisi mengandung makna bantuan khusus kepada guru dalam rangka memperbaiki pembelajaran. Pendapat senada namun lebih lengkap diungkapkan oleh Stoller yang dikutip oleh Nur Aedi menyatakan: “*Supervision as the improvement of instruction seems be concerned with-overseeing, directing, guiding, conducting, regulating, controlling, moving, to hard a goal, etc-workers (teacher), who give or teach knowledge or*

---

<sup>15</sup> Pupuh Fathurrohman, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 4

<sup>16</sup> Daryanto, *Supervisi Pembelajaran*, (Gava Media: Yogyakarta, 2015), h. 1

<sup>17</sup> Jasmani Asf, Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan Terobosan ...*, h. 26

<sup>18</sup> Ngalim Purwanto, *Administrasi dan supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 76

<sup>19</sup> Peter F. Oliva, *Supervision For Today's School*, (New York: Longman Inc, 1984), h. 9

*information in such a manner that there is resulting „increase in value or in excellence of quality or condition”*<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui supervisi merupakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru melalui bantuan supervisor melalui aktivitas pengawasan, pengarahan, bimbingan, contoh, regulasi, pengendalian, upaya ke arah pencapaian tujuan pembelajaran, serta bentuk aktivitas lainnya.

Menurut Peter F. Oliva merumuskan bahwa “*Supervision is defined a service provided to teachers for the purpose of improving of instructional. It is the student who is the ultimate beneficiary of instructional improvement*”.<sup>21</sup>

Dari definisi tersebut, menambahkan penjelasan bahwa pengawasan digambarkan sebagai suatu jasa/layanan yang diberikan kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini siswa menjadi objek terakhir sebagai penerima proses pembelajaran. Sehingga dapat dirumuskan supervisi tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Kata kunci dari pemberi supervisi pada akhirnya ialah memberikan layanan dan bantuan.<sup>22</sup>

Supervisi merupakan istilah yang dalam rumpun pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Di dalam kegiatan supervisi, pelaksanaan bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung untuk pembinaan, agar kondisi pekerjaan yang senang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata-mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki.<sup>23</sup>

Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan kepada madrasah pada umumnya dan guru pada khususnya agar kualitas pembelajarannya meningkat. Sebagai dampak meningkatnya kualitas

---

<sup>20</sup> Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h.14

<sup>21</sup> Peter F. Oliva, *Supervision For ...*, h. 23

<sup>22</sup> Piet A.Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 19.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 2.

pembelajaran, tentu dapat meningkat pula prestasi belajar siswa, dan itu berarti meningkatlah kualitas lulusan madrasah itu. Jika perhatian supervisi sudah tertuju pada keberhasilan siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan di madrasah, berarti bahwa supervisi tersebut sudah selesai dengan tujuannya. Oleh karena itu siswalah yang menjadi pusat perhatian dari segala upaya pendidikan, berarti bahwa supervisi sudah mengarah pada subjeknya.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada definisi-definisi manajemen dan supervisi di atas, maka dapat diketahui bahwa manajemen supervisi adalah pengelolaan organisasi yang terukur dan terencana dengan target khusus, diawali dengan sebuah persiapan yang matang, diteruskan dengan proses yang baik dan pengawasan yang berkesinambungan sehingga hasil evaluasinya menghasilkan nilai baik dan dari hasil evaluasi tersebut bisa diketahui kekurangan-kekurangan yang bisa dijadikan acuan untuk menjadikannya lebih baik yaitu bantuan dan bimbingan atau tuntunan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar mengajar dengan melakukan simulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinu sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran.

#### **b. Tujuan Manajemen Supervisi**

Tujuan supervisi adalah memberikan memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas untuk meningkatkan kualitas siswa. Supervisi pendidikan mempunyai tujuan dan manfaat yang penting, oleh sebab itu tujuan supervisi haruslah jelas dan terarah kepada siapa yang akan disupervisi. Diantara tujuan supervisi menurut Mukhtar dan Iskandar antara lain yaitu:

- 1) Membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administratif sekolah lainya untuk menjalankan tugas dengan sebaik baiknya
- 2) Agar guru dan pegawai adminitrasi lainya berusaha untuk melengkapai kekurangan-kekurangan mereka dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk bermacam-macam media instruks-

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar ...*, h. 25.

tusional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar dan mengajar yang baik

- 3) Bersama-sama mengembangkan, mencari, dan menggunakan metodemetode baru demi kemajuan proses belajar dan mengajar yang baik.
- 4) Membina kerjasama yang harmonis anatar guru, murid, dan pegawai sekolah. Misalnya dengan mengadakan seminar, *workshop*, *in service*, maupun training.<sup>25</sup>

Sergiovanni dalam bukunya Mukhtar dan Iskandar menegaskan tujuan supervisi yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran
- 2) Pengawasan, supervisor dapat memonitor proses pembelajaran di sekolah
- 3) Pengembangan profesional supervisor dapat membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam memahami pembelajaran, kehidupan di kelas serta mengembangkan keterampilan mengajar
- 4) Motivasi guru supervisor dapat mendorong guru menerapkan dan mengembangkan kemampuannya serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya.<sup>26</sup>

Tujuan supervisor sendiri baiknya dapat memberi bantuan, serta dapat memberikan konsultasi masalah yang dialami oleh para guru baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya dalam mengatasi anak yang kesulitan dalam belajar, yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi tatap muka dalam kelas.

### **c. Fungsi Manajemen Supervisi**

Fungsi central supervisi akademik adalah ke arah perbaikan dan peningkatan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya, khusus perbaikan mutu peserta melalui bantuan berupa bimbingan atau tuntunan

---

<sup>25</sup> Mukhtar & Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2009), h. 41

<sup>26</sup> Mukhtar & Iskandar, *Orientasi Baru ...*, h. 41

kepada guru-guru untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaikbaiknya.<sup>27</sup> Sedangkan fungsi supervisi menurut Jamal Ma'mur sman yaitu: .

- 1) Sebagai suatu kegiatan yang meningkatkan mutu pendidikan
- 2) Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan
- 3) Sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing<sup>28</sup>

Menurut Swearingen bukunya yang berjudul *Supervision of instruction Foundation and Dimension* yang dikutip oleh Piet A. Sahertian mengemukakan 8 fungsi supervisi yaitu:

- 1) Mengkoordinasi semua usaha sekolah
- 2) Memperlengkapi kepemimpinan sekolah
- 3) Memperluas pengalaman guru-guru
- 4) Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif
- 5) Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus
- 6) Menganalisis situasi belajar mengajar
- 7) Memberi pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf
- 8) Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegritas dalam merumuskan.<sup>29</sup>

Dalam pelaksanaan supervisi ada beberapa hal yang dapat diungkapkan sekaligus menjadi fungsi pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Dari pihak` guru dapat diketahui kurang adanya semangat kerja, kesediaan bekerjasama dan berkomunikasi, kecakapan dalam melaksanakan tugas, menguasai metode mengajar, memahami tujuan dan program kerja, dan kurang mentaati peraturan

---

<sup>27</sup> Pupuh Fathurrohman, *Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Teras, 2012), h. 35

<sup>28</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*, (Jogjakarta: Diva Pers, 2012), h. 45

<sup>29</sup> Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: PT Rineks Cipta, 2010), h. 21

ketertiban,

- 2) Dari pihak siswa atau peserta didik dapat diketahui kurang adanya kerajinan dan ketekunan siswa atau peserta didik, mentaati peraturan, keinisiatifan tentang perlunya belajar guna mempersiapkan diri bagi kebutuhan masa depan, dan dan sebagainya
- 3) Dari sisi prasarana dapat diketahui kurang terpenuhinya syarat-syarat tentang gedung, halaman, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya, termasuk kurang tersedianya alat-alat pelajaran seperti, bangku, kursi, lemari, papan tulis, buku-buku pelajaran dan lain sebagainya
- 4) Dari pihak kepala sekolah dapat diketahui kurang adanya tanggung jawab pengabdian, kewibawaan, pengetahuan, dan sebagainya, bahkan mungkin kepala sekolah terlalu otoriter, terlalu lunak, bersikap masa bodoh, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian di atas menurut Oteng Sutisna ada 3 fungsi supervisi pendidikan:

- 1) Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan
- 2) Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan
- 3) Sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.<sup>31</sup>

Mengingat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah yang begitu berat dan kompleks tentunya semakin luas dan semakin banyak bidangnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran jalan sekolah secara teknik dan akademik saja tetapi bahwa hak itu adalah tugas dan tanggung jawab yang pokok bagi kepala sekolah. Akan tetapi mengingat situasi dan kondisi serta pertumbuhan sekolah di Negara kita dewasa ini, banyak masalah baru yang timbul dan harus dipecahkan dan dilaksanakan.

---

<sup>30</sup> Mukhtar dan Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan...*, h. 53

<sup>31</sup> Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, (Bandung: Angkasa, 1983), h. 18



#### d. Prinsip Manajemen Supervisi

Prinsip supervisi dimana pola pikir harus lebih kongkrit di laksanakan berdasarkan data, fakta, dan objektif. Ada beberapa hal prinsip menurut Sahertian yaitu: <sup>32</sup>

##### 1) Prinsip Ilmiah

Prinsip ilmiah mengandung beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar-mengajar
- b) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data, seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya
- c) Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinu.

##### 2) Prinsip Demokratis

Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasar atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.

##### 3) Prinsip Kerja Sama

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi *sharing of idea*, *sering of experience*, memberi support mendorong, menstimulus guru-guru, merasa tumbuh bersama d. Prinsip Konstruktif dan Kreatif Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreatifitas kali supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara yang menakutkan.

Sedangkan Menurut Suharsimi dan Arikunto prinsip-prinsip supervisi yaitu:

---

<sup>32</sup> Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar Dan ...*, h. 0

- 1) Bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru, staf, sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan, bukan mencari kesalahan,
- 2) Pemberian bantuan yang diberikan secara langsung, artinya bahwa bimbingan dan bantuan tersebut diberikan secara langsung tetapi harus diupayakan agar pihak yang bersangkutan tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi diri sendiri. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai fasilitator.
- 3) Apabila kepala sekolah merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa. Dalam memberikan umpan balik sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan atau pertanyaan atau tanggapan
- 4) Supervisi sebaiknya diberikan secara berkala minimal 3 bulan sekali.
- 5) Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi. Dengan kata lain dalam pelaksanaan supervisi dapat tercipta suasana kemitraan yang akrab
- 6) Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisi membuat catatan singkat, berisi hal-hal yang penting yang diperlukan untuk membuat laporan.<sup>33</sup>

Dengan catatan ringkas dan jelas tersebut supervisor akan sangat terbantu menyusun laporan mengenal kembali apa yang sudah dilakukan ketika datang terakhir disuatu sekolah. Agar catatan tersebut bermakna, sebaiknya dapat dibahas antara kepala sekolah dalam forum kelompok kerja kepala sekolah (MKKS) Menurut Imam Tolkhah ada 4 macam prinsip supervisi yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Suharsimi dan Arikunto, *Dasar-Dasar Supervis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 19

<sup>34</sup> Imam tolkhah dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), h. 200.

- 1) Supervisi bersifat korektif Maksud dari korektif yaitu seorang kepala sekolah bukan mencari kesalahan, tetapi dapat menemukan kekurangan atau suatu kesalahan profesi, maka kepala sekolah segera untuk memperbaiki dan menyusun rencana atau tata kerja yang baik dimasa-masa selanjutnya.
- 2) Supervisi bersifat preventif kepala sekolah harus bisa mengemukakan kesulitan-kesulitan yang ada dengan rasional sehingga ditemukan jawaban solutif yang mampu mencegah terulangnya kemungkinan kesalahan serupa, supervisi yang sifatnya mencegah kesulitan yang dihadapi, dan berusaha untuk memupuk rasa percaya diri.
- 3) Supervisi bersifat konstruktif atau mengembangkan wawasan pengetahuan Kepala sekolah seharusnya senantiasa berusaha membangun kreasi dan imajinasi kearah pengembangan pendidikan yang lebih baik secara kompetitif.
- 4) Supervisi bersifat kreatif Kepala sekolah harus memberikan “rangangan” kepada semua civitas sekolah supaya mereka lebih produktif dan kreatif, serta bisa membangun kerjasama yang baik.

Lebih lanjut lagi Pangaribuan dkk memaparkan dalam bukunya Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana menyatakan bahwa prinsip-prinsip utama yang perlu dijadikan pedoman dan diterapkan oleh Kepala Sekolah sebagai supervisor adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Ilmiah

Kegiatan supervisi yang dikembangkan harus disusun secara sistematis objektif dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar

- 2) Kooperatif

Program supervisi dikembangkan atas dasar kerjasama antara

---

<sup>35</sup> Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan*, Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 160

kepala sekolah dan guru kepala sekolah diharapkan mampu bekerjasama dengan guru peserta didik dan seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar.

3) Konstruktif dan kreatif

supervisi dilakukan untuk membina guru agar mampu mengambil inisiatif sendiri dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Guru tidak hanya menunggu ajakan, imbauan, atau perintah dari kepala sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar. Supervisor diharapkan mampu menggerakkan guru-guru mengembangkan diri dan profesinya, berinisiatif mengambil prakarsa/prakarsa dan giat memperbaiki program pengajaran dan pendidikan serta konstruktif, memberikan semangat kepada peserta didik mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan kepercayaan diri yang tinggi dan mengurangi timbulnya rasa takut, memberi semangat pada peserta didik untuk mengembangkan komunikasi ilmiah yang bebas terarah, memperkenalkan peserta didik menentukan sendiri sasaran dan evaluasi terhadap dirinya sendiri, dan menghadiri supervisi yang terlalu ketat atau kaku dan otoriter. Memberi kesempatan kepada guru dan atau peserta didik memiliki motivasi pribadi dan tanggung jawab terhadap tindakannya

4) Realistis

Pelaksanaan supervisi pendidikan harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala sesuatu yang ada pada situasi atau kondisi secara objektif. Oleh sebab itu, harus dihindari kegiatan yang sifatnya berpurapura.

5) Progresif

Setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari ukuran dan perhatian terhadap setiap langkah yang ditempuh untuk memperoleh kemajuan. Hal ini ditandai dengan semakin lancarnya kegiatan yang dilaksanakan, atau semakin matangnya proses dari setiap unsur yang berperan dalam situasi belajar-mengajar.

## 6) Inovasi

Program supervisi pendidikan selalu melakukan perubahan dengan penemuan baru dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran dan pendidikan. Dalam hal ini kepala sekolah dan guru harus terbuka terhadap perubahan yang terjadi pada ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial, sehingga segala gagasan yang berkaitan dengan perubahan pendidikan akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki sikap inovatif yang tinggi terhadap tugas profesinya.

### e. Teknik Supervisi

Ada beberapa hal teknik yang perlu di perhatikan dalam melakukan supervisi agar lebih mudah dan terarah. Menurut Dariyanto Teknik supervisi dibedakan menjadi dua, yaitu teknik individual dan kelompok berikut teknik yang di sampaikan oleh Dariyanto, yaitu:<sup>36</sup>

#### 1) Teknik Individual/ Perseorangan

Teknik perseorangan adalah teknik yang dilakukan seseorang terhadap guru yang akan disupervisi. Dalam teknik individual/ perseorangan ada beberapa hal yang harus di lakukan dalam teknik uni yaitu:

##### a) Mengadakan kunjungan kelas

Made Pidarta mengemukakan ciri-ciri supervisi kunjungan kelas yaitu:

- (1) menentukan waktu menadakan supervisi,
- (2) bersifat individual,
- (3) tidak ada pertemuan awal,
- (4) waktu supervisi cukup singkat,
- (5) dapat mengoservasi lebih dari satu kelas,
- (6) dapat mengintervensi guru & siswa dalam satu kelas
- (7) yang disupervisi adalah kasus-kasus,

---

<sup>36</sup> Dariyanto, *Supervisi Pembelajaran...*, h. 205

- (8) kunjungan dilakukan baik sebelum maupun setelah usai pembelajaran,
  - (9) boleh tidak mengadakan pertemuan balikan,
  - (10) tindak lanjut, jika pertemuan balikan tidak diadakan berarti tindak lanjut supervisi juga tidak ada.<sup>37</sup> Tujuannya untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar, apakah sudah memenuhi syarat-syarat didaktis atau metodik yang sesuai.
- b) Mengadakan kunjungan observasi
- Guru-guru ditugaskan untuk melihat/memahami seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu.
- c) Membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi peserta didik atau mengatasi problema yang dialami peserta didik
- d) Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah.
- (1) Menyusun program semester
  - (2) Menyusun atau membuat program satuan pelajaran
  - (3) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas
  - (4) Melaksanakan teknik-teknik evaluasi pengajaran
  - (5) Menggunakan media dan sumber dalam proses pembelajaran
  - (6) Mengorganisasi kegiatan-kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler, study tour, dan sebagainya.
- 2) Teknik Kelompok
- Yang dimaksud dengan teknik kelompok adalah supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah sebagai supervisor kepada guru yang disupervisi secara berkelompok. Teknik kelompok adalah

---

<sup>37</sup> Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontektual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 100- 103

suatu cara pelaksanaan program supervisi yang ditujukan pada atau lebih. Berikut ini teknik yang bersifat kelompok yaitu menurut Syaiful Sagala yaitu:<sup>38</sup> 1) Pertemuan orientasi 2) Rapat guru 3) Setudi kelompok antara guru latih 4) Diskusi sebagai proses kelompok 5) Tukar menukar pengalaman 6) Loka karya 7) Diskusi panel 8) Seminar 9) Simposium 10) Demonstrasi mengajar 11) Perpustakaan jabatan 12) Buletin supervisi 13) Membaca langsung 14) Mengikuti kursus 15) Organisasi jabatan 16) Laboratorium jabatan 17) Perjalanan sekolah.

Dengan demikian bahwa teknik supervisi sangat penting untuk dimiliki oleh kepala sekolah, tanpa penguasaan teknik dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan baik. Seorang kepala sekolah tidak akan efektif kegiatan supervisinya sebelum menguasai teknik dalam bidang supervisi. Teknik supervisi akan lebih memudahkan pencapaian sasaran-sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk berkembang.

Adapun teknik supervisi menurut Mulyasa dalam bukunya Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1) Kunjungan Dan Observasi Kelas

Kunjungan dan observasi kelas dilakukan dalam rangka mencari informasi proses pembelajaran berlangsung di kelas, yang meliputi penggunaan metode mengajar, penggunaan alat atau media dalam pembelajaran, penguasaan guru di kelas dan hal lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang selanjutnya hasil dari observasi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memotivasi, mengarahkan, membina, dan membimbing guru dalam peningkatan kualitas

---

<sup>38</sup> Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 175

<sup>39</sup> Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan...*, h.173

pembelajaran dan peningkatan prestasi belajar peserta didik

2) Pembicaraan Individual

Pembicaraan individual adalah pembicaraan antara supervisor dan supervisi dalam proses supervisi. Pembicaraan ini dapat dilakukan dengan didahului kunjungan dan observasi kelas atau tanpa didahului dengan kunjungan dan observasi kelas. Pembicaraan dapat terjadi karena inisiatif supervisor, atau permintaan yang disupervisi jika ia memerlukan bantuan atau pemecahan suatu masalah.

3) Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok merupakan forum pertemuan yang melibatkan banyak orang untuk bertukar pikiran dan informasi dalam upaya memperbaiki proses dan hasil pembelajaran. Diskusi dapat dilakukan dalam skala besar seperti diskusi panel, loka karya, workshop, dan sebagainya juga dapat dilakukan dalam skala kecil seperti rapat guru pertemuan guru mata pelajaran sejenis dan sebagainya

4) Demonstrasi Mengajar

Demonstrasi mengajar dilakukan dengan mendatangkan kan guru yang profesional dalam mengajar sehingga guru lain dapat mengambil pelajaran dan manfaat dari cara mengajar yang telah dilihatnya. Demonstrasi mengajar juga dapat dilakukan oleh supervisor sebagai contoh cara mengajar yang tepat. Setelah demonstrasi dilakukan, hendaknya guru diberi kesempatan untuk menganalisis segala sesuatu yang telah dilihatnya

5) Perpustakaan

Profesional Pelaksanaan supervisi pendidikan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini guru sehingga guru akan menjadi profesional, yang selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya melalui kegiatan membaca buku. Oleh karena itu perlu diwujudkan



perpustakaan yang menyediakan buku-buku berkualitas yang penting dan menunjang pelaksanaan tugas guru.

Dilihat dari cara menghadapi guru yang dibimbing adapun teknik-teknik supervisi, yang dapat dibedakan menjadi teknik langsung dan tidak langsung:

- 1) Teknik langsung dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a) Menyelenggarakan rapat guru;
  - b) Menyelenggarakan workshop;
  - c) Kunjungan kelas;
  - d) Mengadakan konferensi
- 2) Teknik tidak langsung antara lain dilaksanakan dengan cara:
  - a) Melalui buletin bord;
  - b) Kuesioner;
  - c) Membaca terpimpin.<sup>40</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, untuk menetapkan teknik teknik supervisi yang tepat tidaklah mudah. Seseorang kepala sekolah selain harus mengetahui aspek atau bidang keterampilan yang akan dibina, juga harus mengetahui karakteristik setiap teknik diatas dan sifat atau kepribadian guru sehingga teknik yang digunakan benar-benar sesuai dengan guru yang sedang dibina melalui supervisi tersebut.

#### **f. Kegiatan Manajemen Supervisi**

Adapun penjelasan mengenai kegiatan manajemen supervisi sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Perencanaan supervisi akademik

Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya apa harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Untuk itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional ...*, h. 173

<sup>41</sup> Donni Juni Priansa dan Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan...*, h. 176-180

<sup>42</sup> Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2008), h. 49-50.

Perencanaan program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi utama, yaitu: Perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat disediakan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien, dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>43</sup>

Perencanaan program supervisi akademik adalah penyusunan dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat perencanaan supervisi akademik adalah: (a) pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik, (b) untuk menyamakan persepsi seluruh warga madrasah tentang program supervisi akademik, (c) penjaminan penghematan dan keefektifan penggunaan sumber daya madrasah (tenaga, waktu dan biaya).<sup>44</sup>

Tahap dalam perencanaan supervisi akademik yaitu persiapan supervisi akademik yang pada dasarnya adalah mempersiapkan berbagai perangkat berkaitan dengan pelaksanaan supervisi antara lain:

- a. Pengembangan instrument yang telah disesuaikan dengan konsep standar nasional pendidikan
- b. Identifikasi sekolah melalui data base yang ada direktorat pembinaan
- c. Penetapan petugas sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Selanjutnya dalam tahap persiapan juga dilakukan Coaching bagi petugas yang akan ke lapangan (sekolah), pedoman supervisi, instrument supervisi, penskoran dan

---

<sup>43</sup> <http://jukriadit.blogspot.co.id/2014/04/makalah-manajemen-pendidikan..> html di akses, Kamis 8 Oktober 2021 pukul 10:37 WIB

<sup>44</sup> Lantip Diat Prasonjo, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), h. 96

penilaian, pelaporan supervisi dan lainnya.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dalam perencanaan program supervisi akademik yang pada dasarnya adalah mempersiapkan berbagai perangkat berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik.

## 2) Pelaksanaan supervisi akademik

Pelaksanaan supervisi diarahkan pada kegiatan belajar mengajar dalam rangka pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pelaksanaan supervisi disesuaikan dengan teknik-teknik supervisi. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu: (a) pertemuan pendahuluan, (b) perencanaan guru dan supervisor, (c) pelaksanaan observasi.<sup>46</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan supervisi E. Mulyasa mengatakan terdapat tiga tahap dalam pelaksanaan dalam melakukan supervisi akademik yaitu:

### a. Tahap pertemuan awal.

Langkah yang diperlukan dalam tahap ini adalah:

- 1) Kepala sekolah menciptakan suasana yang akrab dengan guru sehingga terjadi kerjasama yang kolegial. Dengan kondisi ini diharapkan guru dapat mengutarakan pendapatnya secara terbuka.
- 2) Kepala sekolah dengan guru membahas rencana pembelajaran yang dibuat guru untuk menyepakati aspek mana yang menjadi fokus perhatian supervisi, serta menyempurnakan rencana pembelajaran tersebut.
- 3) Kepala sekolah bersama guru menyusun instrument observasi yang digunakan atau memakai instrument yang telah ada, termasuk cara menggunakan dan menyimpulkannya.

### b. Tahap observasi kelas tahap ini guru mengajar dikelas,

---

<sup>45</sup> Ibid h 97

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), h. 385-386

dilaboratorium atau di lapangan, dengan menerapkan keterampilan yang disepakati bersama. Kepala madrasah melakukan observasi dengan menggunakan instrument yang telah disepakati. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam observasi yaitu:

- 1) Kepala madrasah menempati tepat yang telah disepakati bersama
  - 2) Catatan observasi harus rinci dan lengkap
  - 3) Observasi harus berfokus pada aspek yang telah disepakati
  - 4) Dalam hal tertentu, kepala madrasah perlu membuat komentar yang sifatnya terpisah dengan hasil observasi
  - 5) Jika ada ucapan guru yang mengganggu proses pembelajaran kepala sekolah perlu mencatatnya
- c. Tahap pertemuan umpan balik, tahap ini observasi didiskusikan secara terbuka antara kepala madrasah dengan guru. Beberapa hal yang perlu dilakukan kepala madrasah dalam pertemuan balikan anatara lain:
- 1) Kepala sekolah memberikan penguatan terhadap penampilan guru, agar tercipta suasana yang akrab dan terbuka
  - 2) Kepala sekolah mengajak guru menelaah tujuan pembelajaran yang menjadi fokus perhatian dalam supervisi
  - 3) Menanyakan perasaan guru tentang jalannya pelajaran. Sebaiknya pelajaran diawali dari aspek yang dianggap berhasil, baru dilanjutkan dengan aspek yang dianggap kurang berhasil. Kepala sekolah jangan memberikan penilaian dan biarkan guru menyapaikan pendapatnya.
  - 4) Kepala sekolah menunjukkan data hasil observasi yang telah dianalisis dan diinterpretasikan. Beri kesempatan untuk guru untuk mencermati data tersebut dan

menganalisisnya.

- 5) Kepala madrasah menanyakan kepada guru bagaimana pendapatnya terhadap data hasil observasi dan analisisnya. Dilanjutkan dengan mendiskusikan secara terbuka tentang hasil observasi tersebut. Dalam diskusi harus dihindari kesan menyalahkan. Usahakan agar guru menemukan sendiri kekurangannya.
- 6) Secara bersama menentukan rencana pembelajaran berikutnya, termasuk kepala madrasah memberikan dorongan moral bahwa guru mampu memperbaiki kekurangannya.<sup>47</sup>

Dengan demikian, agar supervisi akademik dapat membantu guru mengembangkan kemampuannya, maka untuk pelaksanaannya terlebih dahulu perlu diadakan penilaian kemampuan guru, sehingga bisa ditetapkan aspek yang perlu dikembangkan dan cara mengembangkannya.

### 3) Evaluasi supervisi akademik

Evaluasi adalah pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut TR Morrison yang dikutip oleh Nanang, ada tiga faktor penting dalam konsep evaluasi, yaitu: pertimbangan, deskripsi objek penilaian, dan kriteria yang bertanggungjawab. Dalam aktivitas mengevaluasi, ada tiga kegiatan besar yang biasanya dilakukan oleh supervisor, yaitu: identifikasi tujuan evaluasi penyusunan desain dan metodologi evaluasi serta pengukuran.

Suharsimi Arikunto mengidentifikasi kegiatan evaluasi program yang dilaksanakan pengawas ini dengan kajian penelitian. Proses evaluasi merupakan upaya mencari suatu fakta dan kebenaran dalam pelaksanaannya harus objektif dan rasional, prinsip metode ilmiah harus diterapkan. Ada beberapa teknik evaluasi program yang biasanya dipakai oleh supervisor dalam mencari data untuk

---

<sup>47</sup> Direktorat tenaga kependidikan, Metode dan teknik supervisi, 2008 h. 31

tindak lanjut, yaitu: (1) test, (2) observasi, (3) laporan diri, (4) evaluasi diri, (5) teman sejawat.<sup>48</sup>

Setelah supervisi akademik dilakukan perlu dievaluasi dan ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan profesionalisme guru. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru melalui pelaksanaan tindak lanjut yaitu:

a. Pembinaan

Kegiatan pembinaan dalam supervisi akademik dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Sedangkan pembinaan tidak langsung dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi.

Beberapa cara yang dapat dilakukan kepala madrasah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan secara efektif petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya
- 2) Menggunakan buku tes secara efektif
- 3) Menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama pelatihan profesional (inservice training)
- 4) Mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki
- 5) Menggunakan metodologi yang luwes (fleksibel)

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan ...*, h. 384

- 6) Merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik
  - 7) Menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran
  - 8) Mengelompokkan siswa secara lebih efektif
  - 9) Mengevaluasi siswa dengan lebih akurat /teliti/seksama<sup>49</sup>
- b. Pemantapan instrument supervisi akademik

Kegiatan memantapkan instrument supervisi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor tentang instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi, dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Persiapan guru untuk mengajar terdiri dari: Silabus, Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Program tahunan, Program semesteran, Pelaksanaan proses pembelajaran, Penilaian hasil pembelajarandan Pengawasan proses pembelajaran.
- 2) Instrument supervisi kegiatan belajar mengajar terdiri dari: Lembar pengamatan, Suplemen observasi (keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya)
- 3) Komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrument supervisi akademik, maupun instrumen supervisi non akademik
- 4) Penggandaan instrumen dan informasi kepada guru studi binaan atau kepada karyawan untuk instrument non akademik<sup>50</sup>

Dengan demikian, dalam tindak lanjut supervisi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaannya kegiatan tindak lanjut supervisi

---

<sup>49</sup> Lantip Diat Prasajo, Supervisi Pendidikan,.....h. 121

<sup>50</sup> Lantip Diat Prasajo, Supervisi Pendidikan,.....h. 122-123

akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar

- 2) Hasil analisis, catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, setidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin muncul.
- 3) Umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberi kesempatan untuk mendorong guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya.
- 4) Dari umpan balik itu pula dapat tercipta suasana komunikasi yang harmonis

Prasojo dan sudiyono mengemukakan cara-cara melakukan tindak lanjut hasil supervisi akademik yaitu sebagai berikut:

- a. Mereview rangkuman hasil penilaian.
- b. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik adalah standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan.
- c. Apabila ternyata memang tujuan belum tercapai, maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya.
- d. Membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya.
- e. Mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya.
- f. Ada lima langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademik yaitu:



- 1) menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis
- 2) analisis kebutuhan
- 3) mengembangkan startegis dan media,
- 4) menilai dan
- 5) revisi.<sup>51</sup>

## B. Komite Madrasah

### a. Pengertian Komite Madrasah

Pengertian Komite Madrasah menurut Ade Irawan adalah Institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan komite Madrasah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.<sup>52</sup>

Selanjutnya dalam Undang-undang Pendidikan disebutkan bahwa Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>53</sup> Menurut Bedjo Sujanto, ada 4 poin mengenai Komite Madrasah, yaitu 1) Badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan, 3) Nama Generik, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, 4) BP3, Komite Madrasah dan atau Majelis Madrasah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai dengan acuan ini.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Dedy Mustafid, Khairuddin, Sakdiah Ibrahim, “supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada MIN 2 kota takongon kabupaten aceh tengah)...”, h. 5

<sup>52</sup> Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah-Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta*, (Jakarta: ICW, 2014), h. 42

<sup>53</sup> Lihat Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

<sup>54</sup> Bejo Sujanto, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta:CV Sagung Seto, 2017), h. 61

Sedangkan menurut Sukirno memberikan definisi, bahwa Komite Madrasah adalah wadah atau organisasi kerjasama orangtua/wali siswa dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dengan Kepala Madrasah beserta seluruh guru yang ada di Madrasah/Madrasah masing-masing.<sup>55</sup>

Berdasarkan devisi tentang komite Madrasah di atas maka dapat disimpulkan bahwa Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra Madrasah maupun jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan terikat dengan Madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya.

#### **b. Landasan Yuridis dan Struktur Organisasi Komite Madrasah**

Terbentuknya organisasi Komite Madrasah dilandasi dengan asumsi bahwa masyarakat baik yang berada di dalam madrasah maupun di lingkungan sekitar madrasah memiliki hak dan kewajiban untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Landasan yuridis pembentukan Komite Madrasah tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 yang meliputi nama, kedudukan, sifat, tujuan, serta peran dan fungsi.

##### 1) Nama dan Kedudukan

Nama Komite Madrasah tertuang dalam Kepmendiknas (Kemendiknas, 2002) yang berbunyi bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Satuan Pendidikan, seperti Komite Madrasah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Madrasah, Dewan Madrasah, Majelis Madrasah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.<sup>56</sup>

Sebelum adanya Kepmendiknas tahun 2002 tentang Komite Madrasah, nama Komite Madrasah juga sudah digunakan. Menurut Sri Renani, dkk, nama Komite Madrasah yang dipakai sekarang

---

<sup>55</sup> Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016), h. 1

<sup>56</sup> Kepmendiknas Nomor 04 4/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*

ini ditentukan berdasarkan AD/ART yang ditetapkan oleh Panitia Pembentukan Komite Madrasah atau pengurus Komite Madrasah yang baru terpilih. Kedudukan Komite Madrasah tentu saja berada dalam Satuan Pendidikan.<sup>57</sup>

Menurut Sri Renani, dkk (2007: 80), Komite madrasah dapat dibentuk melalui dua alternatif yaitu: pertama, Komite Madrasah yang hanya dibentuk untuk satu Satuan Pendidikan sehingga berkedudukan di madrasah yang bersangkutan saja. Kedua, Komite yang dibentuk untuk beberapa Satuan Pendidikan yang berada dalam satu kompleks yang sama dengan berbagai jenis dan jenjang madrasah yang berbeda.<sup>58</sup>

## 2) Sifat

Komite Madrasah bersifat mandiri, tidak tergantung pada pihak manapun. Hal tersebut telah tertuang dalam Kemdiknas yang menjelaskan bahwa Komite Madrasah adalah badan yang bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan hirerarkis dengan lembaga pemerintah daerah. Sri Renani,, mengemukakan bahwa Komite Madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBS).<sup>59</sup>

## 3) Tujuan

Tujuan pembentukan Komite Madrasah menurut Kemdiknas (2002) adalah: (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dapat melahirkan kebijakan dan program pendidikan yang dapat mendorong kemajuan madrasah; (2) mendorong peningkatan tanggungjawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (3) menciptakan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis dalam mewujudkan

---

<sup>57</sup> Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2017), h. 79

<sup>58</sup> Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, h. 801

<sup>59</sup> Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, h. 80-81

pendidikan yang bermutu.<sup>60</sup>

Menurut Hasbullah, pada dasarnya posisi Komite Madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak madrasah sebagai institusi, kepala madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya.<sup>61</sup>

#### 4) Peran dan fungsi

Menurut Sri Renani, dkk., Komite Madrasah memiliki peran sebagai berikut: (1) pemberi pertimbangan; (2) pendukung; (3) pengontrol; dan (4) mediator.<sup>62</sup> Sementara menurut Hasbullah, Komite Madrasah juga berfungsi dalam hal: (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu; (2) menjalin kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat untuk kemudian didiskusikan dengan pihak madrasah; (4) memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (5) mendorong orang tua dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (6) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (7) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

---

<sup>60</sup> Kepmendiknas Nomor 04 4/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*

<sup>61</sup> Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 90

<sup>62</sup> Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, h. 81

penyelenggaraan, dan output pendidikan di satuan pendidikan. Peran dan fungsi Komite yang telah dipaparkan di atas masih sebatas garis besarnya saja.<sup>63</sup>

#### 5) Struktur Organisasi

Pembentukan Komite Madrasah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Hasbullah, menjelaskan pengertian transparan, akuntabel dan demokratis dalam pembentukan Komite Madrasah.<sup>64</sup> Transparan berarti bahwa pembentukan Komite Madrasah mulai dari tahap persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Sementara akuntabel berarti pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan dana kepanitiaan harus dilaporkan oleh panitia persiapan pembentukan Komite Madrasah. Demokratis berarti bahwa proses pemilihan anggota dan pengurus Komite Madrasah harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Komite Madrasah, selain beranggotakan guru dan pihak yayasan madrasah, juga harus mengikutsertakan perwakilan dari wali siswa, tokoh masyarakat di sekitar Satuan Pendidikan terkait, serta figur-figur lain dalam masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hasbullah menjelaskan keanggotaan Komite Madrasah terdiri dari unsur masyarakat.<sup>65</sup> Unsur-unsur tersebut dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat; pakar pendidikan dan anggota masyarakat yang memiliki perhatian untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat; organisasi profesi tenaga pendidikan; perwakilan siswa

---

<sup>63</sup> Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan:...*, h. 93

<sup>64</sup> Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: ...*, h. 100

<sup>65</sup> Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: ...*, h. 100



bagi tingkat lanjutan yang dipilih secara demokratis; dan perwakilan forum alumni SD/SMP/SMA yang telah dewasa dan mandiri.

Sementara itu, menurut Sri Renani dkk., anggota pengurus Komite Madrasah merupakan representasi dari orang tua siswa dan masyarakat, meskipun beberapa madrasah memberlakukan representasi orang tua siswa tersebut berdasarkan jumlah kelas di madrasah tersebut.<sup>66</sup> Berdasarkan Kepmendiknas, kepengurusan Komite Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila memang membutuhkan perluasan bidang program kerja, maka boleh ditambah dengan beberapa bidang yang dibutuhkan.<sup>67</sup> Hal yang perlu diperhatikan dalam kepengurusan Komite Madrasah adalah ketua Komite Madrasah tidak boleh dijabat oleh kepala Satuan Pendidikan.

Selain itu menurut Sri Renani, dkk., sebenarnya Komite Madrasah tidak perlu memiliki Pembina dan badan pemeriksa karena dapat mengurangi kemandirian Komite Madrasah, akan tetapi beberapa madrasah ada yang mencantumkan Pembina dan badan pemeriksa.<sup>68</sup>

### c. Tujuan Pembentukan Komite Madrasah

Nanang Fatah berpendapat bahwa Komite Madrasah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat Madrasah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.<sup>69</sup>

Dari definisi di atas, bahwa Komite Madrasah adalah suatu lembaga yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis

---

<sup>66</sup> Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, h. 98

<sup>67</sup> Kemdiknas, No 044/U/2002, dalam: <http://dikdas.kemdikbud.go.id/application/media/file/content-pdf>. Diakses pada hari Rabu, 10 Oktober 2021 pkl 09.45 WIB

<sup>68</sup> Renani, S. dkk., *Komite Sekolah: ...*, h. 97

<sup>69</sup> Nanang Fattah, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014), h.158

oleh *stakeholder* (pengguna/pelanggan) pendidikan yang ada di Madrasah. Tujuan pembentukan Komite Madrasah menurut Bejo yang mengutip Kepmendiknas adalah 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2) Meningkatkan tanggungjawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>70</sup>

Dengan demikian tujuan pembentukan Komite Madrasah adalah untuk mewedahi, menyalurkan dan meningkatkan peranserta masyarakat, serta menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah.

#### **d. Peran dan Fungsi Komite Madrasah**

Komite Madrasah memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan pendidikan. Menurut Sukirno berpendapat bahwa peran Komite Madrasah sebagai pemberi pertimbangan, (*Advisory Agency*), badan pendudukan (*Supporting Agency*), badan pengawas/ pemantau (*Controlling Agency*), mediator (*Mediator Agency*)<sup>71</sup>.

Selanjutnya, peran Komite secara rinci menurut Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan peran Komite Madrasah secara rinci adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

##### 1) Badan Pemberi Pertimbangan (*advisory*)

Sebagai pemberi pertimbangan Komite Madrasah berperan dalam: memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) kriteria kinerja satuan pendidikan, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria fasilitas pendidikan, dan

---

<sup>70</sup> Bejo Sujanto, *Manajemen Berbasis ...*, h. 62

<sup>71</sup> Sukirno, *Pedoman Kerja Komite ...*, h. 59

<sup>72</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional Kegiatan dan indikator kinerja Komite sekolah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013), h. 125

(6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

2) Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Sebagai badan pertimbangan, Komite Madrasah berfungsi dalam:

1) mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, 2) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, dan 3) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

3) Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Sebagai badan pengontrol, Komite Madrasah berperan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

4) Badan Penghubung (*Mediator Agency*)

Sebagai badan penghubung, Komite Madrasah berfungsi dalam, 1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan, 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Peran serta masyarakat melalui Komite Madrasah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Menurut Syaiful Sagala, menyebutkan bahwa aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Madrasah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan Madrasah bagi anak-anaknya.<sup>73</sup>

Sedangkan secara fungsional menurut Umaedi bahwa Komite Madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.

---

<sup>73</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 247



- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a) kebijakan dan program pendidikan, b) RAPBS, c) kriteria kinerja satuan pendidikan, d) kriteria tenaga kependidikan e. kriteria fasilitas pendidikan, e) hal-hal yang terkait dengan pendidikan.
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.<sup>74</sup>

Dengan demikian, peran dan fungsi Komite Madrasah tidak dapat dipisahkan, karena ada keterkaitan antara peran dan fungsi. Contohnya, pada saat Komite Madrasah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, maka Komite Madrasah harus menindaklanjuti dengan cara mendorong komitmen partisipasi masyarakat agar mendukung pelaksanaan pengelolaan pendidikan menuju kemandirian madrasah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran komite madrasah adalah pelayan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak demi kesejahteraannya, seperti komite dan orang tua yang memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang juga merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra Madrasah maupun jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah.

---

<sup>74</sup> Umaedi, *Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2014), h. 406-407

## C. Mutu Pendidikan

### a. Pengertian Mutu Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan tidak boleh sembarangan, pendidikan harus bermutu. Feigenbaum dalam Nasution, mengemukakan bahwa kualitas atau mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Oleh karenanya, maka pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memuaskan para siswa. Tentu saja siswa yang puas adalah siswa yang memperoleh banyak ilmu dan prestasi belajar.<sup>75</sup>

Sudarwan Danim dalam Umiarso dan Gojali memiliki pandangan lain tentang pengertian mutu. Menurutnya, mutu pendidikan mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama*, kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia, seperti kepala madrasah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. *Kedua*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana madrasah, dan lain-lain. *Ketiga*, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita<sup>76</sup>

Edward Deming mengemukakan bahwa, hakikat mutu dalam pendidikan antara lain yaitu:<sup>77</sup>

#### 1) Menciptakan Konsistensi Tujuan.

Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa, dimaksudkan untuk menjadikan madrasah sebagai madrasah yang kompetitif dan berkelas dunia.

#### 2) Mengadopsi Filosofi Mutu Total

Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif

---

<sup>75</sup> Nasution, *Manajemen Mutu ...*, h. 15

<sup>76</sup> Umiarso & Imam Gojali. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010), h. 125

<sup>77</sup> Edward Deming, *Leadership for Quality*, Executive Handbooks, (New York, 2017), h. 85-90



dan hal tersebut dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah dalam keunggulan dalam kompetitifnya.

3) Mengurangi Kebutuhan Pengujian

Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi masal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan.

4) Menilai Bisnis Madrasah dengan Cara Baru

Menilai bisnis madrasah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Pandanglah madrasah sebagai pemasok siswa dari kelas satu sampai kelas-kelas selanjutnya.

5) Memperbaiki Mutu dan Produktivitas serta Mengurangi Biaya

Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya, dengan melembagakan proses “rencanakan/periksa/ ubah”.

6) Belajar Sepanjang Hayat

Mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Bila Anda mengharapkan untuk mengubah cara bekerja mereka, Anda mesti memberi mereka perangkat yang diperlukan untuk merubah proses kerja mereka.

7) Kepemimpinan dalam Pendidikan

Merupakan tanggungjawab manajemen untuk memberikan arahan. Para manajer dalam pendidikan mesti mengembangkan visi dan misi untuk wilayah, madrasah atau jurusan. Visi dan misi harus diketahui dan didukung oleh para guru, staf, siswa, orangtua dan komunitas.

8) Mengeleminasi Rasa Takut

Lenyapkanlah bekerja karena dorongan rasa takut dari wilayah, madrasah atau jurusan, maka setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan madrasah.

9) Mengeleminasi Hambatan Keberhasilan

Menejemen bertanggungjawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya.

10) Menciptakan Budaya Mutu

Ciptakanlah budaya mutu. Jangan biarkan gerakan menjadi bergantung pada seseorang atau sekelompok orang. Ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggungjawab pada setiap orang.

11) Perbaiki Proses

Tidak ada proses yang pernah sempurna; karena itu, carilah cara terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa pandang-bulu. Menemukan solusi harus didahulukan, dan bukan mencari-cari kesalahan.

12) Membantu Siswa Berhasil

Hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru atau administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyannya.

13) Komitmen

Manajemen mesti memiliki komitmen terhadap budaya mutu. Manajemen mesti berkemauan untuk mendukung memperkenalkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu ke dalam sistem pendidikan.

14) Tanggung Jawab

Biarkan setiap orang di madrasah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu. Transformasi merupakan tugas setiap orang.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan**

Adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang secara bersama-sama dapat menentukan mutu keseluruhan dari suatu sistem pendidikan.<sup>78</sup> Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal berupa: kurikulum, sumber daya ketenagaan, sarana dan fasilitas, pembiayaan pendidikan, manajemen madrasah, dan kepemimpinan. Kemudian faktor eksternal meliputi: partisipasi politik yang rendah, ekonomi yang tidak berpihak pada pendidikan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Muh. Bachrum, *Pengelolaan Pendidikan Bermutu* (Depdikbud Kabupaten Sleman, 2011), h. 26

<sup>79</sup> Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan* (Jakarta: PT. Grasindo, 2012), h. 14

### c. Karakteristik mutu pendidikan

Menurut Husaini Usman mengatakan bahwa mutu memiliki 13 karakteristik seperti berikut ini:<sup>80</sup>

- 1) Kinerja (*performa*): berkaitan dengan aspek fungsional madrasah. Misalnya: kinerja guru dalam mengajar baik, memberikan penjelasan meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap. Pelayanan administratif dan edukatif madrasah baik yang ditandai hasil belajar tinggi, lulusannya banyak, putus madrasah sedikit, dan yang lulus tepat waktu banyak.
- 2) Waktu wajar (*timeliness*): selesai dengan waktu yang wajar. Misalnya: memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Waktu ulangan tepat. Batas waktu pemberian pekerjaan rumah wajar. Waktu untuk guru naik pangkat wajar.
- 3) Handal (*reliability*): usia pelayanan prima bertahan lama. Misalnya: pelayanan prima yang diberikan madrasah bertahan dari tahun ke tahun, mutu madrasah tetap bertahan dari tahun ke tahun.
- 4) Daya tahan (*durability*): tahan banting. Misalnya: meskipun krisis moneter, madrasah masih tetap bertahan, tidak tutup. Siswa dan guru tidak putus asa dan selalu sehat
- 5) Indah (*aesthetics*). Misalnya: eksterior dan interior madrasah ditata menarik. Taman ditanami bunga dan terpelihara dengan baik. Guru-guru membuat media pendidikan yang menarik. Warga madrasah berperanampilan rapi.
- 6) Hubungan manusiawi (*personal interface*): menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya: warga madrasah saling menghormati, baik warga intern maupun ektern madrasah, demokratis, dan menghargai profesionalisme.
- 7) Mudah penggunaannya (*easy of use*). Sarana dan prasarana dipakai. Misalnya: aturan-aturan madrasah mudah diterapkan. Buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu.

---

<sup>80</sup> Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 512-513

- 8) Bentuk khusus (*feature*): keunggulan tertentu. Misalnya: madrasah ada yang unggul dengan hampir semua lulusannya diterima di universitas bermutu. Unggul dengan bahasa Inggrisnya. Unggul dengan penguasaan teknologi informasinya (komputerisasi).
- 9) Standar tertentu (*conformance to specification*): memenuhi standar tertentu. Misalnya: madrasah sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), madrasah sudah memenuhi standar minimal ujian nasional .
- 10) Konsistensi (*Consistency*): keajegan, konstan, atau stabil. Misalnya: Mutu madrasah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun seperti harus mengatrol nilai siswa-siswanya. Warga madrasah konsisten antara perkataan dengan perbuatan.
- 11) Seragam (*uniformity*): tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya: madrasah menyeragamkan pakaian madrasah dan pakaian dinas. Madrasah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu atau pilih kasih.
- 12) Mampu melayani (*serviceability*): mampu memberikan pelayanan prima. Misalnya: madrasah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan sebaik-baiknya.
- 13) Ketepatan (*Accruracy*): ketepatan dalam pelayanan. Misalnya: Madrasah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan madrasah, guru-guru tidak salah dalam menilai siswa-siswanya.

#### **d. Komponen Mutu Pendidikan**

Manajemen Mutu Terpadu yang diterjemahkan dari *Total Quality Management (TQM)* atau disebut pula Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. M. Jusuf Hanafiah, dkk mendefinisikan Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis dalam menyelenggarakan suatu organisasi, yang mengutamakan kepentingan pelanggan. pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan



dan mengendalikan mutu.<sup>81</sup>

Sedang yang dimaksud dengan Pengelolaan Mutu Total (PMT) Pendidikan tinggi (bisa pula madrasah) adalah cara mengelola lembaga pendidikan berdasarkan filosofi bahwa meningkatkan mutu harus diadakan dan dilakukan oleh semua unsur lembaga sejak dini secara terpadu berkesinambungan sehingga pendidikan sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan sesuai dengan dan bahkan melebihi kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun yang akan datang.

Adapun komponen yang terkait dengan mutu pendidikan yang termuat dalam buku Panduan Manajemen Madrasah adalah 1) siswa: kesiapan dan motivasi belajarnya, 2) guru : kemampuan profesional, moral kerjanya (kemampuan personal), dan kerjasamanya (kemampuan sosial). 3) kurikulum: relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya, 4) dan, sarana dan prasarana: kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran, 5) Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi): partisipasinya dalam pengembangan program-program pendidikan madrasah. Mutu komponen-komponen tersebut di atas hendaknya menjadi fokus perhatian kepala madrasah.<sup>82</sup>

Adapun prinsip dari MMT dalam buku tersebut yaitu selama ini madrasah dianggap sebagai suatu Unit Produksi, dimana siswa sebagai bahan mentah dan lulusan madrasah sebagai hasil produksi. Dalam MMT madrasah dipahami sebagai Unit Layanan Jasa, yakni pelayanan pembelajaran. Sebagai unit layanan jasa, maka yang dilayani madrasah (pelanggan madrasah) adalah: 1) Pelanggan internal: guru, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi, 2) Pelanggan eksternal terdiri atas: pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orang tua, pemerintah dan masyarakat), pelanggan tertier (pemakai/penerima lulusan baik diperguruan tinggi maupun dunia usaha).

---

<sup>81</sup> Hanafiah, M. Jusuf, dkk, *Pengelolaan Mutu Total Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri, 2014), hal. 4

<sup>82</sup> Tim Penyusun, *Panduan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Depdiknas, Dikmenum, 2000), hal. 191.

Edward Sallis menyarankan kepada para pemimpin dalam upaya peningkatan mutu, antara lain:

- 1) Mempunyai visi atau daya pandang yang jauh dan mendalam tentang mutu yang terpadu bagi lembaganya maupun bagi dirinya;
- 2) Mempunyai komitmen yang jelas pada proses peningkatan kualitas;
- 3) Mengomunikasikan pesan yang berkaitan dengan kualitas;
- 4) Meyakinkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat perhatian, dan kebijakan lembaga;
- 5) Menyampaikan terhadap para pelanggan (siswa, orang tua, masyarakat) bahwa lembaganya layak mendapat kepercayaan;
- 6) Mengarahkan perkembangan anggotanya;
- 7) Melakukan inovasi terhadap madrasah;
- 8) Memberikan kepastian bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab yang jelas;
- 9) Berkomitmen untuk berupaya menyelesaikan semua rintangan;
- 10) Membangun tim yang efektif;
- 11) Mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi.<sup>83</sup>

Sementara itu Nur Zazin mengukur keberhasilan pendidikan madrasah dapat dikatakan bermutu jika madrasah/ madrasah mampu memberikan harapan kepuasan pelanggan dengan mengutip pendapat tim depdiknas dimana:

- 1) Siswa puas dengan layanan madrasah, yaitu dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, pimpinan, fasilitas dan situasi madrasah;
- 2) Orang tua siswa merasa dengan layanan terhadap anaknya, layanan yang diterimanya dengan laporan perkembangan kemajuan belajar anaknya, dan program yang dijalankan madrasah;
- 3) Pihak pemakai atau penerima lulusan (PT, industri, masyarakat) puas karena menerima lulusan yang berkualitas tinggi dan sesuai harapan;

---

<sup>83</sup> Edward Sallis, *Total Quality ...*, hal. 174



- 4) Guru dan karyawan puas dengan layanan madrasah, dalam bentuk pembagian kerja, komunikasi antar guru/ pimpinan/karyawan, gaji yang diterima dan pelayanan lainnya.<sup>84</sup>

Untuk dapat mewujudkan mutu pendidikan, harus melihat bagaimana proses penyelenggaraan pendidikannya. Dari segi proses, mutu pendidikan berarti keefektifan dan efisiensi seluruh faktor yang berperan yaitu: a) kualitas guru; b) sarana dan prasarana; c) suasana belajar; d) kurikulum yang dilaksanakan; e) pengelolaan madrasah.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2014), hal.65.

<sup>85</sup> Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu ...*, hal.66.





### BAB III

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN SUPERVISI DI MI MUHAMMADIYAH GETAS BANJARNEGARA

### A. MI Muhammadiyah Getas Banjarnegara

MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan dasar bercirikan pendidikan agama Islam dengan lama belajar 6 tahun. MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara berdiri pada tanggal 1 Januari 1960 dengan ijin operasional nomor :Lk/3.C/2218/PGMI/1978 tanggal 1 Januari 1978.<sup>86</sup>

Letak geografis MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara berada di titik koordinat Long: -7.443837 Lat: 109.513092 di dukuh Getas Desa Pringamba RT 02 RW 04 Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Madrasah ini berdampingan dengan Kompleks Perkantoran. Sebelah barat Kantor Desa Pringamba. Sebelah utara ada Puskesmas dan SMP Negeri 1 Pandanarum.<sup>87</sup>

Sedang jumlah tenaga pendidik saat ini 2 orang Guru PNS, 7 Guru NON PNS tanpa seorang tenaga kebersihan. Harapan kami sebagai kepala madrasah dicukupi guru PNS sejumlah rombel yang ada yaitu

---

<sup>86</sup> Dokumentasi, catatan sejarah pendirian MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dikutip tanggal 2 Januari 2022

<sup>87</sup> Dokumentasi, catatan sejarah pendirian MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dikutip tanggal 2 Januari 2022

6 rombel. Sehingga dengan jumlah guru yang cukup, lokal yang cukup dan representatif, harapan kita MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu profil Madrasah di Kabupaten Banjarnegara, tentu agar disegani oleh semua madrasah di Kabupaten Banjarnegara.

## **2. Letak Geografis**

MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara berkedudukan di Desa Pringamba, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah dilihat secara geografis merupakan tempat yang strategis untuk suatu pendidikan dengan pertimbangan:

- a. Dekat dengan ruas Jalan Raya antara Kalibening dengan Lawen, sehingga memudahkan transportasi siswa.
- b. Satu-satunya madrasah dilingkungan Kecamatan Pandanarum, sehingga dapat menampung minat lulusan dari TK maupun RA untuk melanjutkan ke madrasah bercirikan Pendidikan Agama Islam.
- c. Ditengah-tengah lingkungan yang sangat religius.<sup>88</sup>

Jika dilihat dari batas-batasnya, maka MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dibatasi tempat-tempat sebagai berikut: Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Penduduk. Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun penduduk. Sebelah barat berbatasan dengan jalan utama desa. Sebelah utara berbatasan dengan jalan utama desa Kecamatan Pandanarum.<sup>89</sup>

## **3. Struktur Organisasi**

Secara umum struktur organisasi pada lembaga pendidikan adalah sama, termasuk di maka MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dimana kepengurusannya semua di bawah

---

<sup>88</sup> Observasi, letak geografis MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 3 Januari 2022

<sup>89</sup> Observasi, letak geografis MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 3 Januari 2022.

kepemimpinan Kepala Madrasah yang berkerja sama dengan komite madrasah. Kemudian di bantu oleh waka kesiswaan, sarpras, kurikulum dan humas. Kemudian tugas mengajar menjadi tanggung jawab guru-guru sebagai tenaga pendidik. Untuk lebih jelasnya, mengenai struktur organisasi maka MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara sudah dapat dilihat pada lampiran.

#### 4. Data Madrasah

- a. Nama Madrasah : MI Muhammadiyah
- b. Alamat : Desa Pringamba  
Kecamatan : Pandanarum  
Kabupaten : Banjarnegara
- c. Nama Kepala Madrasah : Farkah, S.Pd.I
- d. NSM : 111233040192
- e. Yayasan pendiri : MUHAMMADIYAH
- f. SK Pendirian (Yayasan):
- g. Ijin Operasional : No.SK WK/5c/3956/Pgm.MI/1982  
tgl 01 bln 06 th 1982
- h. Akreditasi (terakhir) : B Tahun 2013 <sup>90</sup>

#### 5. Visi, Misi dan Tujuan

##### a. Visi

Visi Madrasah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan Madrasah yang secara khusus diharapkan oleh Madrasah. Visi Madrasah merupakan turunan dari Visi Pendidikan Nasional, yang dijadikan dasar atau rujukan untuk merumuskan Misi, Tujuan sasaran untuk pengembangan Madrasah dimasa depan yang diimpikan dan terus terjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Adapun visi MI Muhammadiyah Getas

---

<sup>90</sup> Dokumentasi, data profil MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara adalah: **“Unggul dalam Prestasi, Santun dalam Perilaku Berdasarkan Iman dan Taqwa.”**<sup>91</sup>

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut di atas, Misi MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan keagamaan dan nilai budi pekerti
- 2) Menciptakan pola kehidupan berdasarkan norma agama, budaya dan bangsa
- 3) Membina masyarakat untuk berperan aktif dalam kemajuan pendidikan nasional
- 4) Menanamkan sikap sopan santun, budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari
- 5) Membina, memelihara dan melestarikan budaya daerah Banjarnegara
- 6) Berupaya menjadikan Madrasah sebagai tempat yang menyenangkan.<sup>92</sup>

c. Tujuan

Secara umum, tujuan pendidikan MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara secara umum adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mempunyai tujuan secara khusus sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan siswa menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan Berakhlakul karimah

---

<sup>91</sup> Dokumentasi, data profil MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

<sup>92</sup> Dokumentasi, data profil MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

- 2) Mewujudkan siswa menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan dan bertanggungjawab
- 3) Mewujudkan siswa yang memiliki peradaban dan budaya yang berciri khas islam ala ahlussunah wal jama'ah
- 4) Mewujudkan siswa yang mampu mengembangkan dirinya serta dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- 5) Menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan bimbingan sesuai nilai-nilai Islam.
- 6) Menanamkan akhlakul karimah pada peserta didik yang santun dalam bersikap, berbicara dan berperilaku.<sup>93</sup>

## 6. Keadaan Guru dan Karyawan

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keadaan guru di MI Muhammadiyah Getas Pandanarum Kabupaten Banjarnegara ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

Keadaan guru dan karyawan MI Muhammadiyah Getas Pandanarum Kabupaten Banjarnegara<sup>94</sup>

No.	Nama/NIP	Jabatan	Mengajar Kls / Mapel
1	Farkah, S.Pd.I	Kepala	Kelas VI
2	Ari Budiaturun, S.Pd.I	Guru	Kelas I
3	Mugi Lestari, S.Pd.I	Guru	Kelas II
4	Septi Nurrohmah, S.Pd.I	Guru	Kelas III
5	Lilis Budianti, S.Pd.I	Guru	Kelas IV
6	Sulistiyawati, S.Sos.I	Guru	Kelas V
7	Maya Arieani	TU	
8	Febri Imawan	Pesuruh	

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa keadaan guru dengan jumlah tersebut dan dengan kualifikasi pendidikannya,

<sup>93</sup> Dokumentasi, data profil MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

<sup>94</sup> Dokumentasi, data guru dan karyawan MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

maka akan mampu memberikan pendidikan yang berkualitas sehingga mampu mencapai tujuan pendidikannya.

## 7. Keadaan Siswa

Mengenai keadaan siswa untuk tahun pelajaran 2020/2021 mencapai angka 79 yang terbagi menjadi 3 tingkat, kelas I, II, III, IV, V dan VI masing-masing kelas terdiri dari satu rombongan belajar. Mengenai keadaan siswa MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Keadaan Siswa MI Muhammadiyah Getas Pandanarum  
Kabupaten Banjarnegara <sup>95</sup>

No.	Kelas	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa		Jumlah Seluruhnya
			Laki-Laki	Perempuan	
1	I	1	13	4	17
2	II	1	6	9	15
3	III	1	7	7	14
4	IV	1	8	5	13
5	V	1	5	6	11
6	VI	1	5	14	9
<b>Jumlah</b>		6	44	35	79

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah siswa menunjukkan bahwa MI Muhammadiyah Getas Pandanarum Kabupaten Banjarnegara sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Pandanarum khususnya dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada umumnya.

## 8. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor penting untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sarpras di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara sudah meliputi gedung tempat

<sup>95</sup> Dokumentasi, data kesiswaan MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.

untuk KBM, ruang laborat untuk praktikkum siswa, dan gedung pendukung lainnya, dan semuanya terawat dengan baik. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Keadaan Sarana dan Prasarana MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara<sup>96</sup>

No	Nama Sarpras	Jumlah	Keterangan
1	Ruang KBM	6	Baik
2	Ruang Kamad	1	Baik
3	Ruang Guru	1	Baik
4	Perpustakaan	1	Baik
5	Ruang TU	1	Cukup
6	Ruang Koperasi	1	Baik
7	Kamar Mandi/WC Siswa	2	Baik
8	Kamar Mandi/WC Guru	2	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan yang cukup lengkap dengan sarana dan prasarananya, sehingga sangat mendukung seluruh aktivitas pendidikannya. Demikian gambaran umum MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Dari berbagai uraian di atas maka dapat digarisbawahi, bahwa MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah modern dan maju di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

## 9. Komite Madrasah

Setiap organisasi memiliki cara atau mekanisme dalam pembentukannya sejak perancangan sampai pengisian struktur dengan orang-orang yang dianggap cakap di bidangnya. Mengenai proses pembentukan pengurus

<sup>96</sup> Dokumentasi, data sarana dan prasarana MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, dikutip tanggal 3 Januari 2022.



Komite Madrasah, MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara umumnya menggunakan prosedur pembentukan yang bersifat praktis dan kekeluargaan, yakni berdasarkan musyawarah antar pengurus yayasan tanpa melalui tahapan-tahapan seperti pembentukan panitia pemilihan komite, penetapan kriteria calon anggota komite penjangkaran calon anggota komite, sampai pada penetapan anggota Komite Madrasah.

Cara yang sederhana dalam membentuk Komite Madrasah ini dilakukan karena dianggap lebih mudah untuk mencari orang-orang yang betul-betul punya perhatian besar terhadap pendidikan di madrasah atau memiliki loyalitas yang tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Madrasah: karena kami ini mengelola pendidikan di madrasah swasta dan yang kami butuhkan adalah orang yang loyal dan berdedikasi tinggi dalam membantu dan mendukung keberadaan MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara ini, maka pembentukan anggota Komite Madrasah kami lakukan melalui cara musyawarah dengan para pengurus madrasah untuk mengidentifikasi orang atau tokoh masyarakat yang sekiranya dapat bekerjasama dengan pihak madrasah untuk mengembangkan lembaga pendidikan ini, kemudian orang yang terpilih berdasar hasil musyawarah tersebut kami tetapkan sebagai pengurus Komite Madrasah.<sup>97</sup>

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh ketua komite bahwa, mengenai pembentukan Komite Madrasah, kami mendasarkannya pada hasil musyawarah pengurus madrasah yang memilih orang-orang yang layak menduduki jabatan komite madrasah, mau memmberikan bantuan tenaga dan pemikirannya untuk madrasah dan kami tinggal menetapkan kepengurusan komite ini.<sup>98</sup>

Namun berbeda sedikit dengan pembentukan Komite Madrasah di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Farkah, selaku kepala MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

<sup>98</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku ketua komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

Banjarnegara, pemilihan komite dilakukan berdasar rapat wali murid pada awal tahun pelajaran. Kepala Madrasah mengatakan: pembentukan pengurus Komite Madrasah dilaksanakan dalam forum rapat wali murid yang kami adakan pada awal tahun pelajaran dimana kami minta usulan dan masukan dari wali murid tentang siapa saja orang yang mereka percayai menjadi wakil mereka dalam Komite Madrasah, dan kami pertimbangkan usulan tersebut, baru kami beserta pengurus madrasah menetapkannya.<sup>99</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pembentukan Komite Madrasah dilakukan dengan cara musyawarah, tetapi hal terpenting yang menjadi pertimbangan adalah loyalitas Komite Madrasah terhadap lembaga madrasah itu sendiri. Adapun kriteria personalnya sangat kental dengan ketokohan masyarakat yang memungkinkan untuk dapat diajak melakukan kerjasama dalam pengembangan pendidikan di madrasah. Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, dapat penulis ketahui bahwa semua pengurus Komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara belum ada yang memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan belum pernah mendapat sosialisasi dari pihak manapun tentang pentingnya peran mereka dalam pendidikan berbasis madrasah.

Mengenai hal ini, ketua komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, mengatakan: Selama menjadi Komite Madrasah ini kami belum pernah mendapat sosialisasi mengenai aturan organisasi Komite Madrasah yang seharusnya, hanya saja pengalaman saya ketika pernah menjadi Komite SMP Negeri 1 Pandanarum dimana anak saya sekolah disana, saya selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan sekolah, dari sinilah saya mengetahui tugas komite, tetapi sampai saat ini belum pernah menyusun AD/ART Komite Madrasah layaknya organisasi yang lain, apa yang kami lakukan untuk madrasah ini berdasarkan panggilan jiwa, bagaimana dapat membantu

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Farkah, selaku kepala MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

penyelenggaraan pendidikan yang basisnya ilmu agama untuk menciptakan generasi *khoirul ummah*.<sup>100</sup>

Pengalaman agak berbeda dialami oleh pengurus komite lainnya, dalam menjadi anggota komite, beliau mengatakan: pengetahuan saya tentang organisasi Komite saya dapatkan karena saya pernah menjadi Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri di desa saya, dan kami semua, ketua Komite Sekolah Negeri di kabupaten Banjarnegara pernah dikumpulkan dan diberi sosialisasi mengenai kedudukan Komite madrasah oleh Dewan Pendidikan, tetapi dalam Komite Madrasah ini belum pernah ada sosialisasi atau perkumpulan komite, sehingga kami juga belum menyusun AD/ART. Walaupun demikian apa yang dapat kami bantu untuk kegiatan madrasah, sebisa mungkin kami lakukan.<sup>101</sup>

Begitu juga mengenai pertemuan atau rapat yang diadakan komite juga belum terjadwal secara tertib, maksudnya rapat yang sudah berjalan bersifat insidental bersamaan dengan agenda kegiatan madrasah. Umumnya pertemuan Komite Madrasah diadakan dua kali dalam satu tahun yaitu awal tahun pembelajaran dan penerimaan rapor. Sebagaimana disampaikan oleh Salah satu guru dalam wawancara kami sebagai berikut: untuk pertemuan dengan para pengurus lainnya tidak pernah kami jadwalkan, tetapi sesuai dengan kebutuhan saja, misalnya sedang ada masalah yang perlu diselesaikan bersama dengan komite, atau saat-saat sedang ada pembangunan ruang/gedung baru seperti inilah pengurus komite intens untuk melakukan pertemuan.<sup>102</sup>

Hal senada dituturkan oleh Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, mengingat kesibukan pengurus komite dengan bedabeda profesi sehingga sulit untuk memadukan waktu yang sama untuk mengadakan pertemuan secara rutin, namun pada awal masa pendirian madrasah ini pengurus

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Akhmad Saefudin, selaku Sekretaris komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ari Budiaturun, selaku guru MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

komite bersama dengan pengurus yayasan dan kepala madrasah lebih sering melakukan pertemuan guna membahas persiapan penerimaan siswa baru sebagai pembukaan program pendidikan, seperti dituturkan oleh Sekretaris Komite saat penulis menanyakan pertemuan yang diagendakan oleh Komite Madrasah sebagai berikut: Terus terang saja pada waktu pengurus yayasan berencana membuka lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, kami pengurus Komite bersama yayasan lebih sering mengadakan pertemuan untuk membahas pembangunan gedung baru, dan saat pembangunan sudah dimulai kami bergantian melakukan pengawasan, kemudian dalam proses penjarangan siswa baru kami juga bertemu untuk membahas strategi untuk mendapatkan murid baru, tetapi setelah pendidikan berjalan memang pertemuan tidak sesering sebelumnya, karena pengurus memiliki kesibukan dan pekerjaan masing-masing maka pertemuan Komite Madrasah hanya kami lakukan kalau memang ada kepentingan.<sup>103</sup>

Belum terjadwalnya pertemuan/rapat Komite Madrasah juga terjadi di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana dikatakan kepala madrasah berikut: selama ini yang saya tahu, pertemuan yang khusus diselenggarakan oleh Komite Madrasah belum ada, karena biasanya rapat Komite Madrasah diadakan bersamaan dengan rapat yayasan dengan Kepala Madrasah, hanya saja pertemuan dan pembicaraan Komite dengan Kepala Madrasah walaupun secara non formal sering kami lakukan misalnya saat kami kosong jam mengajar, sehingga apa yang menjadi permasalahan madrasah langsung dapat kami bahas dan kami carikan solusi.<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembentukan Komite Madrasah dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan keberadaannya di madrasah kurang mendapat kesempatan yang luas sebagai badan mandiri yang memiliki otoritas untuk ikut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan mutu

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Farkah, selaku kepala MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 6 Januari 2022.

pendidikan. Komite madrasah belum memiliki agenda program yang jelas dalam mengemban tugasnya, dan masih adanya ketergantungan yang kuat dengan kepemimpinan Kepala Madrasah, dimana peran mereka sangat bergantung pada kebutuhan pelibatan mereka dalam kebijakan Kepala Madrasah di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara.

## **B. Perencanaan Supervisi Komite Madrasah**

Supervisi komite madrasah di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan tidak akan terlepas dari yang namanya perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan tidak terlepas dari unsur pelaksanaan dan pengawasan/ evaluasi.

Dalam melakukan perencanaan komite sekolah MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara selalu melibatkan kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan karena kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengetahui langsung apa yang terjadi dilapangan. Pendapat, saran dan juga kritikan terhadap program kerja selama satu tahun penting adanya untuk dimusyawarahkan bersama sehingga semua orang memiliki jiwa yang besar untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam perencanaan, komite sekolah MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan terlebih dahulu melihat kebutuhan pendidikan selama setahun. Salah satu contohnya adalah di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, mengenai penambahan gedung yang ingin digunakan untuk asrama siswa.

Komite madrasah berperan mengkomunikasikan problem ini kepada ketua yayasan yang kemudian akan diadakan rapat khusus. Rapat khusus ini hanya dihadiri ketua yayasan, kepala dan ketua komite

. setelah dirembuk maka akan diadakan rapat untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi ini dilakukan sebagai rapat umum yang dihadiri oleh semua pengelola pendidikan, termasuk guru, staf dan partisipan yang membahas tentang apa masalah yang terjadi dan yang ditelaah dirembuk pada rapat khusus.

Sedangkan dalam perencanaan komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara melakukan analisis terlebih dahulu untuk penetapan program selama setahun. Misalnya peningkatan SDM guru dan staf di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan setiap setahun sekali. Hal ini dilakukan karena komite ingin terus berusaha meningkatkan mutu SDM guru dan staf yang akan memudahkan terhadap proses pembelajaran dan pelayanan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Pada intinya, lembaga pendidikan ini memiliki langkah sama dalam perencanaannya, yaitu menganalisis kebutuhan terlebih dahulu kemudian merencanakan kebutuhan-kebutuhan selama setahun.

Dari sinilah komite mengetahui program kerja apa yang harus dilakukan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan selama setahun. Ada beberapa perencanaan kinerja yang dilakukan oleh komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut; (1) Penetapan perencanaan awal tahun, (2) Perencanaan kebijakan selama satu tahun, (3) Perencanaan program kerja peningkatan SDM guru, (4) Perencanaan anggaran, (5) Perencanaan penambahan gedung dan perbaikan gedung, dan (6) Standar kebutuhan tujuan pendidikan. Dari perencanaan di atas, komite dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin dan melakukan evaluasi perencanaan yang telah dilaksanakan selama setahun berjalan.

### C. Pelaksanaan Supervisi Komite Madrasah

Dalam pelaksanaan membutuhkan perencanaan yang matang sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan optimal. Pelaksanaan kinerja komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan sangat maksimal. Hal ini yaitu dalam pelaksanaan kinerja komite sangat optimal, ketua komite terjun langsung kelapangan melihat proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun oleh komite yang disetujui ketua yayasan.

Salah satu contohnya adalah ketika MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara mendapatkan dana tambahan untuk penambahan gedung. Komite terlibat dalam merumuskan anggaran dana yang digunakan untuk penambahan gedung tersebut. Serta mengawasi proses pembangunan gedung itu. Kepala madrasah merasa senang dengan keterlibatan dan keseriusan komite dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan ini.<sup>105</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh kepala MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam satu wawancara, yaitu; saya sebagai kepala melihat kinerja komite disini sangat besar perannya. Apalagi ketika kami ingin merenovasi bangunan. Keterlibatan komite sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas kami. Mulai dari kualitas sarana prasarana, guru, serta murid. Tidak hanya sampai disitu. Komite juga melaksanakan apa yang telah menjadi program kinerjanya selama setahun.<sup>106</sup>

MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi penelitian yang telah diteliti oleh peneliti. Memang terlihat proses pembangunan masih berlangsung di tempat. Ini menandakan bahwa dari kedua tempat penelitian tersebut memang kinerja komite sama-sama besar perannya dan selalu terlibat dalam

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 28 Januari 2022

<sup>106</sup> Wawancara dengan Farkah, selaku Kepala MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 25 Januari 2022

peningkatan mutu pendidikan. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan program kerja, pelaksanaan program kerja peningkatan SDM guru, pelaksanaan penambahan gedung dan perbaikan gedung, dan pelaksanaan standar kebutuhan tujuan pendidikan.

Peningkatan guru salah satu contohnya memang penting dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu guru MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, komite membantu menyiapkan guru-guru untuk mengikuti seminar, pelatihan, workshop, studi banding dan kegiatan-kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing guru. Hal ini sangat membantu terhadap guru dalam meningkatkan wawasan dan kemampuan guru tentang hal yang belum seutuhnya dikuasai. Sehingga guru akan selalu berusaha untuk terus berkembang dan melakukan peningkatan-peningkatan.<sup>107</sup>

Beberapa penegasan tersebut, merupakan bentuk pelaksanaan dari program kerja komite yang telah disusun selama setahun. Untuk mewujudkan perencanaan komite selalu berkordinasi dengan ketua yayasan dan kepala MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Tidak hanya sekedar berkordinasi akan tetapi juga mengkomunikasikan ide dan gagasan ketua yayasan dan kepala , khususnya dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

Komite madrasah dalam melaksanakan supervisi melalui peran sebagai pengontrol, badan yang melakukan pengawasan sosial kepada madrasah. Karena itu pelaksanaannya lebih berimplikasi sosial. Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna, dan secara inheren memiliki keterbatasan, baik berupa interpretasi terhadap rencana yang sudah dirumuskan, kemampuan maupun ketrampilan untuk melaksanakannya. Artinya, dengan i'tikad yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan penerahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 28 Januari 2022



penyelenggara kegiatan di lembaga pendidikan mungkin saja berbuat khilaf bahkan mungkin kesalahan.<sup>108</sup>

Dalam kaitannya dengan komite madrasah, ibarat suatu pemerintahan, jika Kepala Madrasah adalah kepala negara, madrasah adalah negaranya maka Komite Madrasah sebagai DPRnya. Oleh karena itu fungsi pengawasan sangat penting dalam rangka transparansi, demokratisasi, akuntabilitas penyelenggaraan dan output pendidikan.<sup>109</sup>

Supervisi komite madrasah sebagai pengontrol/pengawas yang dapat dilakukan oleh komite madrasah sebagaimana dirinci oleh Syaiful Sagala berupa aktitas sebagai berikut:

- a. menanyakan proses belajar mengajar (pada guru atau murid) apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan;
- b. menanyakan kondisi kesehatan, gizi dan bakat peserta didik;
- c. memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Madrasah;
- d. turut serta dalam penyusunan RKM dan RKT;
- e. ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS;
- f. ikut serta dalam pembagian rapat;
- g. mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- h. mengontrol pelaksanaan PBM dengan menggunakan kartu data sesuai dengan perlindungan anak, cara mengajar guru.<sup>110</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara, jika penulis membandingkan antara rincian peran Komite Madrasah sebagai badan pengontrol kegiatan madrasah, sebagaimana ditulis Sagala dengan frekwensi kehadiran komite di madrasah, penulis melihat bahwa fungsi pengawasan komite terhadap pelaksanaan pembelajaran terbatas pada pemantauan, bukan pengontrolan secara pereodik dan menyeluruh

---

<sup>108</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 259

<sup>109</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), h. 150

<sup>110</sup> Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 259.

kepada seluruh komponen madrasah. Pengontrolan lebih membutuhkan banyak waktu untuk mengecek dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan komponen madrasah dengan seksama.

Hal ini mungkin sedikit berbeda bagi pengurus komite yang juga melakukan tugas mengajar di madrasah terkait, karena memiliki banyak waktu berada di madrasah saat-saat mengajar dapat digunakan sekaligus untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembelajaran, menanyakan kondisi peserta didik, guru dan warga madrasah lainnya, mengawasi pelaksanaan RKM/RKT, memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS, ikut serta dalam pembagian rapat, secara langsung dapat mengecek kesejahteraan guru dan proses belajar mengajar sampai pada hasil pembelajarannya karena dia juga yang mengantarkannya, namun kiranya disinilah terlihat kurang independennya, karena pengurus Komite Madrasah yang terhitung aktif dalam tugasnya ialah mereka yang juga memiliki jam khidmah di madrasah.

Salah satu alasan ketidak independenan tersebut adalah karena dalam hal ini Komite Madrasah juga sebagai anggota bawahan Kepala Madrasah, sehingga memungkinkan kondisi dimana komite madrasah selalu menyetujui perencanaan Kepala Madrasah dan tidak berani mengkritisi kebijakannya. Tetapi disisi lain kepedulian mereka terhadap pendidikan madrasah memang tidak diragukan lagi, misalnya mengefektifkan jam mengajar bagi guru-guru untuk tidak mengulur waktu istirahat setelah bel tanda masuk berbunyi, ikut menangani langsung kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu koordinasi dengan kepala madrasah mengenai permasalahan yang muncul lebih cepat dan mudah karena pertemuan antara Komite dan Kepala Madrasah lebih intensif.

#### **D. Evaluasi Supervisi Komite Madrasah**

Evaluasi sangat penting dilakukan setelah adanya perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang ingin dicapai sudah berjalan atau tidak. Mengenai evaluasi ini komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten

Banjarnegara mengatakan dalam satu wawancara, evaluasi harus dilakukan oleh komite karena evaluasi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan yang telah terprogram itu terlaksana.<sup>111</sup>

Penyataan di atas juga ditegaskan oleh kepala MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam satu wawancara, iya, komite pasti akan melakukan evaluasi terhadap program kerjanya. Itu dilakukan untuk melihat potensi- potensi pencapaian sebuah rencana dan pelaksanaan.<sup>112</sup>

Halsenada juga disampaikan oleh Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam satu wawancara, biasanya komite melakukan evaluasi 3 bulan sekali dan setahun sekali. Itu mutlak dilakukan oleh komite untuk mengetahui sejauh mana program kerjanya berjalan.<sup>113</sup>

Ketua komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara menyampaikan dalam satu wawancara, kalau berbicara tentang bagaimana bentuk evaluasi kita yang pasti setahun sekali komite melakukan evaluasi. Tapi yang ada juga evaluasi yang sifatnya adalah kondisional. Artinya kita tidak menjadwalkan atau tidak ada waktu tertentu dalam evaluasi, kapanpun dan dimanapun kita selalu berkordinasi dan mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi dilembaga pendidikan.<sup>114</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan supervisi melalui kontrol atau pengawasan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan meliputi:

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 28 Januari 2022

<sup>112</sup> Wawancara dengan Farkah, selaku Kepala MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 28 Januari 2022

<sup>113</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 28 Januari 2022

<sup>114</sup> Wawancara dengan H Dwijo Yuwono, selaku Ketua Komite MI Muhammadiyah Getas Pringamba Pandanarum Banjarnegara, tanggal 28 Januari 2022

a. Evaluasi Harian

Komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara melakukan evaluasi. Akan tetapi lebih kepada bagaimana komite mengevaluasi kinerja semua unit dalam kesehariannya yang tidak terikat oleh waktu. Artinya dalam proses evaluasinya komite tidak perlu mengadakan rapat formal atau didalam forum. Di manapun dan kapanpun komite mengevaluasi kegiatan semua pengelola pendidikan.

b. Evaluasi 3 bulanan

Evaluasi supervisi oleh komite MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara ini dilakukan 3 bulan sekali, biasanya dilakukan setelah pelaksanaan UTS. Evaluasi ini hanya membahas kinerja guru dan proses pembelajaran siswa. Jadi hanya guru dan beberapa unit yang ikut menghadiri rapat evaluasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Karena tentu selama 3 bulan kinerja guru pasti akan mengalami hambatan dalam proses pembelajarannya. Sehingga dalam rapat tersebut guru diharuskan membuat laporan kegiatan selama tiga bulan terkait dengan proses pembelajaran.

c. Evaluasi Tahunan

Evaluasi ini dilakukan setahun sekali, biasanya dilakukan bersamaan dengan wisuda kelas VI untuk masalah waktu disesuaikan dengan kebijakan pengelola lembaga pendidikan. Evaluasi ini membahas semua unit yang ada di maupun dimadrasah, seperti penetapan kebijakan selama setahun, SDM guru, SDM siswa, anggaran dana, kurikulum, sarana dan prasarana dan lain sebagainya, jadi evaluasi ini sifatnya lebih umum karena menyangkut semua unit yang dievaluasi.\





## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul, Supervisi Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan supervisi komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dilakukan perencanaan pada awal tahun untuk melakukan rapat dengan beberapa pengelola pendidikan
2. Pelaksanaan supervisi komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan melalui kegiatan: a) Koperasi Madrasah; b) Pengawasan Terhadap Penjadwalan Program Madrasah.; c) Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional. d) Penilaian terhadap angka partisipasi madrasah; e) Penilaian terhadap angka bertahan di madrasah; f) Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di madrasah
3. Evaluasi supervisi komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan setiap 3 Bulanan dan Evaluasi tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dengan rendah hati menyampaikan beberapa saran yang semoga saja dapat dijadikan

sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang berkenaan dengan pelaksanaan supervisi melalui pengawasan dan kontrol oleh komite madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan MI Muhammadiyah Getas Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga pendidikan.

Keberadaan Komite Madrasah memiliki peran penting dalam manajemen berbasis madrasah, kedudukannya sejajar dengan Kepala Madrasah. Sekiranya Komite Madrasah diberikan kesempatan yang luas untuk mengetahui peran-perannya dan menjalankan peran tersebut sebaik-baiknya, supaya partisipasi masyarakat yang terjemakan melalui Komite Madrasah dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di madrasah, dan madrasah bukan hanya menjadi pemilik pendiri dan pengurus yayasan atau korporasi tertentu, tetapi masyarakat dapat merasa memiliki dan terpenggil untuk memberikan dukungan penuh baik berupa moril maupun materiil semata-mata karena ada harapan bahwa ouput yang dihasilkan dari pendidikan di lembaga madrasah ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

2. Bagi Kepala Madrasah

Walaupun dalam manajemen madrasah swasta posisi jabatan Kepala Madrasah berada dibawah yayasan, namun pengelolaan pendidikan tetap ada ditangan kepala madrasah. Kepala Madrasah memiliki peran dan tugas yang tidak ringan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun penilaian program pendidikan, karena itu Kepala Madrasah dituntut untuk dapat memberdayakan semua unsur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan yang dipimpinnya. Keberadaan Komite Madrasah yang merupakan mitra kerjasama Kepala Madrasah, hendaknya jika Komite Madrasah kurang memahami peran dan tugasnya mungkin karena tidak semua anggota Komite memiliki sumber daya manusia yang kompeten, atau karena

kesibukannya tidak semua memiliki banyak waktu untuk pelaksanaan peran tersebut, maka Kepala Madrasah berkenan untuk menggandeng tangan dengan mengundang dan melibatkan mereka, memberikan pengakuan dan penguatan posisi mereka dalam ikut serta mengembangkan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga mereka tidak merasa “pekewuh” untuk memberikan bentuk dukungan, pertimbangan, dan pengawasannya terhadap kebijakan yang akan dan telah diterapkan dalam satuan lembaga pendidikan ini.

3. Bagi Komite Madrasah.

Pembentukan Komite Madrasah mempunyai dasar yang cukup kuat dalam peraturan penyelenggaraan pendidikan. Keberadaannya diharapkan tidak hanya sebagai kelengkapan organisasi yang disyaratkan oleh pemerintah saja, atau sebagai “stempel” kebijakan Kepala Madrasah, namun lebih dari itu, Komite Madrasah diharapkan memberikan masukan-masukannya baik berupa gagasan, tenaga atau materinya untuk membantu upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Dalam rangka pemberdayaan diri untuk meningkatkan mutu pendidikan akan lebih baik jika Komite Madrasah berkenan mengevaluasi perannya selama ini, sudah seberapa besar peran yang mampu dilakukan oleh Komite untuk selanjutnya mengubah diri yang semula mau membantu madrasah jika diminta, menjadi semakin proaktif dalam menjalankan peran dan tugasnya, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

4. Bagi Masyarakat

Keberhasilan pendidikan dapat terwujud karena adanya kerjasama yang erat antara kepala madrasah dengan seluruh jajaran karyawan dan guru, peserta didik maupun masyarakat. Lembaga pendidikan madrasah swasta mampu menjadi lembaga yang besar, semua karena dukungan masyarakat yang dengan sukarela dan gotong-royong mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan madrasah sebagai realisasi dari



kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

5. Bagi Peserta didik

Peserta didik hendaknya menyadari bahwa bahwa setiap komponen dalam lembaga pendidikan memiliki tugas, peran, wewenang dan kewajiban masing-masing. Tugas terpenting peserta didik adalah belajar, maka wujud dari kepedulian peserta didik adalah dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.





## Daftar Pustaka

- Aedi, Nur, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Supervisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi dan Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Al Ma'arif, 2013
- Barlian, Ujang Cepi, *Manajemen Strategik; Konsep dan Implementasi*, Bandung: Khifa Insan Cendikia, 2016.
- Bachrum, Muh., *Pengelolaan Pendidikan Bermutu*, Depdikbud Kabupaten Sleman, 2011.
- Deming, Edward, *Leadership for Quality*, Executive Handbooks, New York, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Acuan Operasional Kegiatan dan indikator kinerja Komite madrasah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, 2013.
- Daryanto, *Supervisi Pembelajaran*, Gava Media: Yogyakarta, 2015.
- Fathurrohman, Pupuh, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam Pendidikan Islam* Jakarta:Teras, 2012.
- Fattah, Nanang, *Manajemen Berbasis Madrasah dan Dewan Madrasah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014.

- \_\_\_\_\_, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Rosdakarya, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Hasbulloh, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Handoko, Tani N., *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Imron, Ali, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Irawan, Ade, dkk., *Mendagangkan Madrasah-Studi Kebijakan MBS di DKI Jakarta*, Jakarta: ICW, 2014.
- Irmaita, Ika, *Pelaksanaan Supervisi Pengajaran Oleh Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMAN 2 Kota Lubuk Linggau*, Lampung: Universitas Negeri Lampung, 2018.
- Kepmendiknas Nomor 04 4/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang *Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah*
- Kompri, *Manajemen Madrasah Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Minarti, Sri, *Manajemen Madrasah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2015.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mursilah, *Kinerja Pengawas Mata Pelajaran IPA di Bengkulu Selatan*, Bengkulu: Tesis PPs Universitas Negeri Bengkulu, 2017.
- Mufidah, Luk-luk Nur, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mustofa, Jasmani Asf, Syaiful *Supervisi Pendidikan Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Madrasah dan Guru*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Mukhtar & Iskandar, *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Gaung Persada Perss, 2009.



- Nazir, Moh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 2003.
- Nurdianawati, *Kinerja Pengawas dalam Pelaksanaan Supervisi Pendidikan di Madrasah Aliyah Kota 32 Bengkulu*, Bengkulu: Tesis PPs Universitas Negeri Bengkulu, 2018.
- Olivia, Peter F., *Supervision For Today's School*, New York: Longman Inc, 1984.
- Pantjastuti, Sri Renani, dkk., *Komite Madrasah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Purwanto, Ngalim, *Administrasi dan supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Prasonjo, Lantip Diat, *Supervisi Pendidikan*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Pidarta, Made, *Supervisi Pendidikan Konstektual*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Priansa, Donni Juni dan Sonny Suntani Setiana, *Manajemen & Supervisi Pendidikan*, Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Mengembangkan Sumberdaya Manusia*, Jakarta: PT Rineks Cipta, 2010.
- Renani, S. dkk., *Komite Madrasah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2017.
- Sagala, Syaiful, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- \_\_\_\_\_, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sahertian, Piet A., *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Saroni, Moh., *Personal Branding Guru*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sudin, Ali, *Implementasi Supervisi Akademik Terhadap Proses Pembelajaran di Madrasah Dasar se-Kabupaten Sumedang*,

Semarang, Tesis PPs Unnes tahun 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sujanto, Bejo, *Manajemen Berbasis Madrasah*, Jakarta: CV Sagung Seto, 2017.

Sukirno, *Pedoman Kerja Komite Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2016.

Sukmadinata, Nana Syaodih dkk., *Pengendalian Mutu Pendidikan Madrasah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrument)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Stoner, James, A.F., Freeman, R. Edward, R. Daniel, JR. Gilbert. *Manajemen*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2000.

Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sutisna, Oteng, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa, 1983.

Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Jakarta: PT. Grasindo, 2012.

Terry, George R., *Principle of Management*, 6th Edition, Georgetown: Richard D, Irwing Inc, 2009.

Tolkhah, Imam dan Ahmad Barizi, *Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi Dan Integrasi Keilmuan Pendidikan Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Umaedi, *Manajemen Berbasis Madrasah/Madrasah*, Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Mutu Pendidikan, 2014.

Umiarso & Imam Gojali. *Manajemen Mutu Madrasah di Era Otonomi Pendidikan* Yogyakarta: IRCiSoD, 2010.

Usman, Husaini, *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

<http://jukriadit.blogspot.co.id/2014/04/makalah-manajemen-pendidikan.> html di akses, Kamis 8 Oktober 2021 pukul 10:37 WIB



## Tentang Penulis



**Teguh Heru Widiyanto** adalah sosok nama penulis Tesis ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Suparman (alm) dan Ibu Sutarti sebagai anak keempat dari Empat bersaudara. Sosok Penulis lahir di Desa Pandanarum Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Juni 1979. Penulis menempuh pendidikan formal dari SD Negeri 02 Pandanarum (lulus tahun 1992), melanjutkan ke SMP Negeri 2 Randudongkal Kabupaten Pemalang (lulus 1995), melanjutkan ke STM Panca Bhakti Banjarnegara (lulus 1998), kemudian melanjutkan ke IKIP PGRI Semarang (lulus 2003), hingga akhirnya bisa melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAINU Kebumen.

Semangat yang tinggi walau cobaan silih berganti terus dihadapi demi keuletan yang tinggi dalam mencari ilmu, dijadikan motivasi dirinya, ketekunan dalam belajarnya untuk terus belajar dan berusaha hingga akhirnya penulis pun bisa menyelesaikan pengerjaan tugas akhirnya berupa Tesis. Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi yang positif pada dunia Pendidikan. (\*)

